



Tumbuh & Berkembang Bersama UMKMK

Grow and Develop Together with SMEs



TENTANG IKHTISAR LAPORAN TAHUNAN PERUM JAMKRINDO 2017

About the Highlights of Perum Jamkrindo Annual Report 2017

Ikhtisar Laporan Tahunan ini merupakan rangkuman kinerja keuangan maupun operasional Perusahaan selama 2017 yang juga bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan 2017.

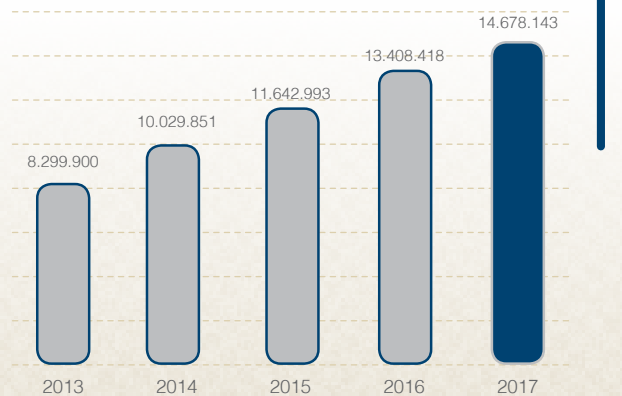
Ikhtisar Laporan Tahunan ini memuat kata “Perusahaan” yang didefinisikan sebagai Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) yang menjalankan bisnis dalam bidang penjaminan kredit UMKMK. Adakalanya kata “Jamkrindo” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut Perum Jamkrindo secara umum.

Highlights in this annual report is a summary of the Company’s operations and financial performance in 2017 which is an integral part of the 2017 Annual Report.

Highlights in this annual report contains the word “Company” which is defined as Public Corporation of Credit Guarantee Indonesia (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia/ Perum Jamkrindo) conducting business in the field of SMEs and Cooperatives credit guarantee. Occasionally the word “Jamkrindo” is also used on the basis of convenience to mention Perum Jamkrindo in general.

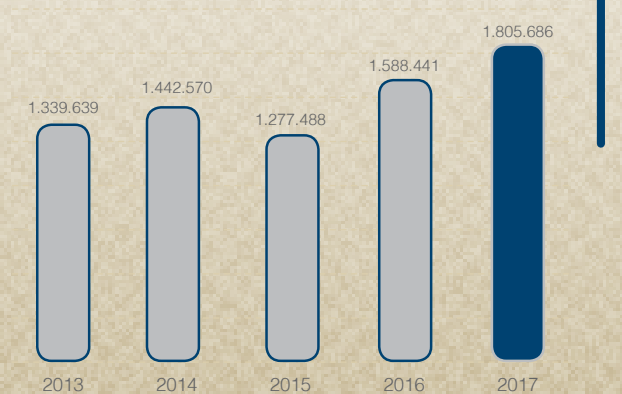
Total Aset Total Assets

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



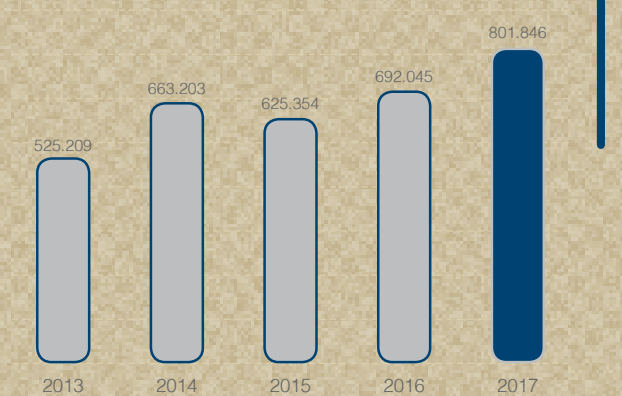
Pendapatan IJP Bersih IJP Revenues-Net

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



Labu Bersih Net Income

(dalam jutaan Rupiah)
(in IDR million)



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



16 September 2017, Juara 3 Pengembangan Strategi Terbaik dalam Acara Anugerah BUMN 2017

September 16, 2017, 3rd Winner of Best Strategy Development in the 2017 BUMN Award Event



16 September 2017, Juara 3 Transformasi dalam Acara Anugerah BUMN 2017

September 16, 2017, 3rd Winner of Transformation in the 2017 BUMN Awards event



16 September 2017, Juara 2 Pengembangan SDM Terbaik dalam acara Anugerah BUMN 2017

September 16, 2017, 2nd Winner of Best Human Resources Development in the 2017 BUMN Anugerah event



6 September 2017, Juara 2 Annual Report Kategori BUMN Keuangan Non Listed, Annual Report Award, OJK, Bank Indonesia, Kementerian BUMN dan KNKG

September 6, 2017, 2nd Winner Annual Report Category of Non-Listed Financial SOEs, Annual Report Award help by FSA, Bank Indonesia, Ministry of SOEs and KNKG



20 Juli 2017, Kinerja Keuangan "Sangat Bagus" 2012-2017, Infobank Golden Trophy 2017, Infobank

July 20, 2017, "Very Good" Financial Performance 2012-2017, Infobank Golden Trophy 2017, Infobank



02 November 2017, Peringkat 4 Kategori Perusahaan BUMN Non Tbk dalam acara Indonesia Good Corporate Governance Award III 2017

November 02, 2017, Rating 4 Category Non-Tbk SOEs, Indonesia Good Corporate Governance Award III 2017



6 November 2017, Good Performance, BUMN Performance Excellence Award 2017, Forum Ekselen BUMN

November 6, 2017, Good Performance, BUMN Performance Excellence Award 2017, Forum Ekselen BUMN



14 Desember 2017, Silver Winner Corporate Branding kategori Brand Strategi, BUMN Branding and Marketing Award 2017

December 14, 2017, Silver Winner Corporate Branding, Brand Strategy category, BUMN Branding and Marketing Award 2017

Daftar Isi

Daftar Isi

Tentang Ikhtisar Laporan Tahunan Perum Jamkrindo 2017 <i>About the Highlights of Perum Jamkrindo Annual Report 2017</i>	2
Aset <i>Assets</i>	3
Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certifications</i>	4
Daftar Isi <i>Daftar Isi</i>	6
Informasi Umum tentang Jamkrindo <i>General Information about Jamkrindo</i>	7
Riwayat Singkat Jamkrindo <i>Jamkrindo Brief History</i>	8
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, and Corporate Culture</i>	11
Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	12
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	14
Produk Usaha Penjaminan <i>Guarantee Business Products</i>	16
Kinerja Perum Jamkrindo <i>Perum Jamkrindo Performance</i>	19
Laporan Laba Rugi <i>Profit (Loss) Statements</i>	21
Rasio Keuangan <i>Financial Ratio</i>	22
Analisis Kinerja Perum Jamkrindo <i>Analysis perum jamkrindo performance</i>	23
Segmen Bisnis Penjaminan Non Program <i>Non-Program Guarantee Business Segment</i>	24
Kinerja Segmen Penjaminan Bank <i>Performance of Bank Guarantee Segments</i>	26
Kinerja Keuangan <i>Financial review</i>	35
Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance</i>	45
Struktur Organ Tata Kelola Perusahaan <i>Organ Structure of Corporate Governance</i>	67
Pengelola Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Manager of Corporate Social Responsibility Programs</i>	69
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan <i>Partnership and Community Development Program</i>	70
Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan <i>List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices</i>	74
Kantor Wilayah <i>Regional Office</i>	74
Kantor Cabang <i>Regional Office</i>	76

Informasi Umum tentang Jamkrindo

General Information about Jamkrindo

Nama Perusahaan <i>Company Name</i>	: Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)
Bentuk dan Status Badan Usaha <i>Business Entity Type and Status</i>	: Perusahaan Umum (Perum)
Tanggal Pendirian <i>Date of Establishment</i>	: 1 Juli 1970 <i>1 July 1970</i>
Dasar Hukum <i>Legal Basis</i>	: <ul style="list-style-type: none">Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia <i>Government Regulation No. 41 of 2008 on Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia</i>Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan <i>Law No. 1 of 2016 on Guarantee</i>Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang <i>Government Regulation No. 1 of 2016 on Guarantee Implementing Agency of Warehouse Receipt System</i>Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 77 tahun 2009 tentang Penetapan sebagai Perusahaan Penjaminan <i>The Decree of Minister of Finance (KMK) No. 77 of 2009 on Stipulation as Guarantee Company</i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin <i>Regulation of the Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 on Business Licenses and Institutionalisation of Guarantee Institution</i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin <i>Regulation of the Financial Services Authority No. 2/POJK.05/2017 About The Operation of Guarantee Business dated January 11, 2017</i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin <i>Regulation of the Financial Services Authority No. 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 on good corporate governance for the guarantee institution</i>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.05/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan <i>Financial Services Authority Regulation No. 7/POJK.05/2014 dated 17 April 2014 on Examination of Guarantee Agency</i>
Dasar Hukum Pelaksanaan Usaha Penjaminan <i>Legal Basis on Implementing Guarantee Business:</i>	
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	: Penjaminan kredit baik bersifat tunai maupun tidak tunai yang diberikan bank atau Badan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) <i>Cash and Non-Cash guarantee given to Banks or Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (SME's)</i>
Jaringan Usaha <i>Business Network</i>	: 9 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 55 Kantor Cabang, dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 1 Jakarta Special Branch Office, 55 Branch Offices, and 16 Service Unit Offices (KUP) scattered throughout Indonesia</i>
Kepemilikan <i>Ownership</i>	: 100% Negara Republik Indonesia, melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara <i>100% owned by the Country of Republic of Indonesia, through the Government of Republic of Indonesia/Ministry of State Owned Enterprise</i>
Penyertaan Modal Negara <i>State Equity Participation</i>	: Rp7.638.733.365.160 <i>IDR7,638,733,365,160</i>
Jumlah Karyawan <i>Number of Employees</i>	: 1.042 orang <i>1.042 people</i>
Alamat <i>Address</i>	: Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon <i>Telephone</i>	: +62 21 6540335
Faksimili/Facsimile	: +62 21 6540344, 6540348
Email	: sekper@jamkrindo.co.id
Situs Web/Website	: www.jamkrindo.co.id
Media Sosial/Social Media	: Instagram: perum_jamkrindo Facebook: Perum Jamkrindo Twitter: perum_jamkrindo Youtube: Perum Jamkrindo



Riwayat Singkat Jamkrindo

Jamkrindo Brief History

SELAYANG PANDANG SEJARAH PERUM JAMKRINDO

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, atau disebut juga dengan “Perum Jamkrindo” atau “Perusahaan” merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang penjaminan kredit, baik konvensional maupun syariah. Sebagai perusahaan BUMN, Perum Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya mensejahterakan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pemberian bantuan konsultasi manajemen berupa pemberian jaminan kredit bersifat tunai maupun non-tunai, yang diberikan oleh bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Perum Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.

Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PKK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara tunai kepada UMKM dan Koperasi melalui pola bagi hasil,

PERUM JAMKRINDO HISTORY AT A GLANCE

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, or also mentioned as “Perum Jamkrindo” or “Company” is a State-Owned Enterprise (SOE) with business activities focusing in credit guarantee, both conventional and Sharia. As an SOE, Perum Jamkrindo is fully committed in implementing and supporting Government policies and programs in national economic and development sectors in order to prosper the life of the nation. The committed implementation is carried out through activities of providing management consultancy support in the form of credit guarantee provision, either Cash and Non-Cash, given by bank or business entity to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (SMEs and Cooperatives). In an effort to improve people’s economy equally and facilitate accessibility, Perum Jamkrindo keeps developing network all over the country and improving and developing the service quality.

Jamkrindo was established in the mid-1970s as a Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK). At that time the development of cooperatives still lags behind compared to state-owned companies and private companies. In its development, LJKK was later changed to Public Corporation Financial Development Cooperative (Perum PKK) through Government Regulation No. 51 of 1981 dated December 23, 1981, which is enhanced by Government Regulation No. 27 of 1985 dated May 31, 1985, concerning Public Corporation Financial Development Cooperative.

The successful implementation of Perum PKK functions and tasks in developing cooperatives through credit guarantee activities makes the Government expand the services reach of Perum PKK to not only be limited to cooperatives, but also to include SMEs. For this effort, the Government issued another policy aiming to strengthen the role of Perum PKK through the issuance of Government Regulation No. 95 of 2000 dated 7 November 2000 which also changed the name of Perum PKK into Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

In 2008, the Government issued Presidential Regulation No. 2 of 2008 dated 26 January 2008 on Guarantee Agency. Regarding changes in Company business which no longer provided cash loan to SMEs and Cooperatives through profit sharing but focused on credit guarantee business



tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia.

PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Kronologi proses perubahan nama Perum Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1985.
2. Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000.
3. Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) seperti yang dikenal saat ini, melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008.

of SMEs and Cooperatives, Perum SPU was renamed to be Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) based on Government Regulation No. 41 of 2008 dated 19 May 2008.

As a follow up to the Presidential Regulation implementation, the Government through the Department of Finance strengthened the legal basis of establishment of the Company and other companies with similar business sectors through Minister of Finance Regulation (PMK) No. 222/PMK.010/2008 dated 16 December 2008 as amended by Minister of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 dated 8 July 2011 on Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company. Through the regulations, Perum Jamkrindo must have a business license as Credit Guarantee Company. Following up the regulation, the Minister of Finance issued a Decree (KMK) No. KEP-77/KM.10/2009 dated 22 April 2009 establishing Perum Jamkrindo's business license as a Credit Guarantee Company.

In 2016, the Government issued Law No. 1 of 2016 dated 19 January 2016 on Guarantee, as a form of seriousness of the Government in protecting and instituting guarantee industry which continues to develop in line with the growth of financial services in Indonesia.

CHANGES IN COMPANY NAME

The chronology of changes of Perum Jamkrindo name from its establishment until now as described above is as follows:

1. The Company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No. 51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) formed in 1970. The Government Regulation was subsequently refined through Government Regulation No. 27 of 1985.
2. The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No. 95 of 2000.
3. The Company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No. 41 of 2008.

1981

**PERUSAHAAN UMUM
PENGEMBANGAN
KEUANGAN KOPERASI
(PERUM PKK)**

Peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970

A merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) formed in 1970

2000

**PERUSAHAAN
UMUM SARANA
PENGEMBANGAN
USAHA (PERUM SPU)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2000

Based on Government Regulation No. 95 of 2000

2008

**PERUSAHAAN UMUM
JAMINAN KREDIT
INDONESIA
(PERUM JAMKRINDO)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008

Based on Government Regulation No. 41 of 2008





Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, and Corporate Culture

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No. S-34/MBU/2014 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Dewan Pengawas dan Direksi menetapkan Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to guarantee professional business conduct based on Validation Letter from the Ministry of SOE No. S-34/MBU/2014 on Company Long Term Plan (RJPP), the Board of Supervisors and Directors establish the Vision, Mission, and Corporate Culture as follows:

Visi	Vision
Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.	To become a Leading Guarantee Company that Supports the National Economic Development.
Misi	Mission
Visi Perusahaan dijabarkan ke dalam misi-misi yang merupakan "Tridharma Jamkrindo" sebagai berikut:	The Company's vision is described into missions and is named "Tridharma Jamkrindo" (Jamkrindo Three 'Dharma') which contain the followings:
Dharma Pertama	First 'Dharma'
Melakukan kegiatan penjaminan bagi pengembangan bisnis UMKM dan Koperasi.	Conducting guarantee activities for business development of SMEs and Cooperatives.
Dharma Kedua	Second 'Dharma'
Memberikan pelayanan yang luas dan berkualitas.	Providing wider and more qualified services.
Dharma Ketiga	Third Dharma
Memberikan manfaat bagi <i>stakeholders</i> sesuai prinsip bisnis yang sehat.	Providing interests to the stakeholders in accordance with sound business principles.

KREDO PERUSAHAAN

Kredo perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir, sebagai berikut:

1. Terpercaya dalam melaksanakan usaha penjaminan.
2. Responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
3. Unggul dan Profesional dalam pelayanan.
4. Sehat dalam tata kelola perusahaan.
5. Terkemuka dalam memberikan kepuasan pelanggan.

CORPORATE CREDO

Perum Jamkrindo's Corporate Credo consists of 5 (five) points as follows:

1. Trustworthy in conducting guarantee business.
2. Responsive to business environment changes.
3. Excellent and Professional service.
4. Healthy corporate governance.
5. Reputable in providing customer satisfaction.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya perusahaan Perum Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "TRUST".

CORPORATE CULTURE

Perum Jamkrindo's Corporate Culture comprises of 5 (five) points of cultural values held by the Company, called "TRUST" culture.

Terpercaya <i>trust</i>	Responsif <i>Responsive</i>	Unggul <i>Excellent</i>	Sehat <i>Healthy</i>	Terkemuka <i>Reputable</i>
Bekerja jujur dengan integritas tinggi <i>Work honestly with high integrity</i>	Tanggap menghadapi kebutuhan mitra usaha dan segenap <i>stakeholder</i> <i>Responsive to meet the needs of business partners and all stakeholders</i>	Selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi perusahaan <i>Always improve professionalism to achieve extra value for the company</i>	Selalu bekerja dengan tekun untuk mendukung tata kelola perusahaan yang sehat <i>Always work diligently to support healthy corporate governance</i>	Selalu terdepan dalam memberikan pelayanan dan kinerja untuk menjadi pemimpin dalam industri penjaminan <i>Always in the forefront in providing services and performances to become the leader in guarantee industry</i>

Substansi yang terkandung di dalam visi, misi, kredo, dan budaya Perusahaan telah diketahui dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan Direktur Utama Perusahaan.

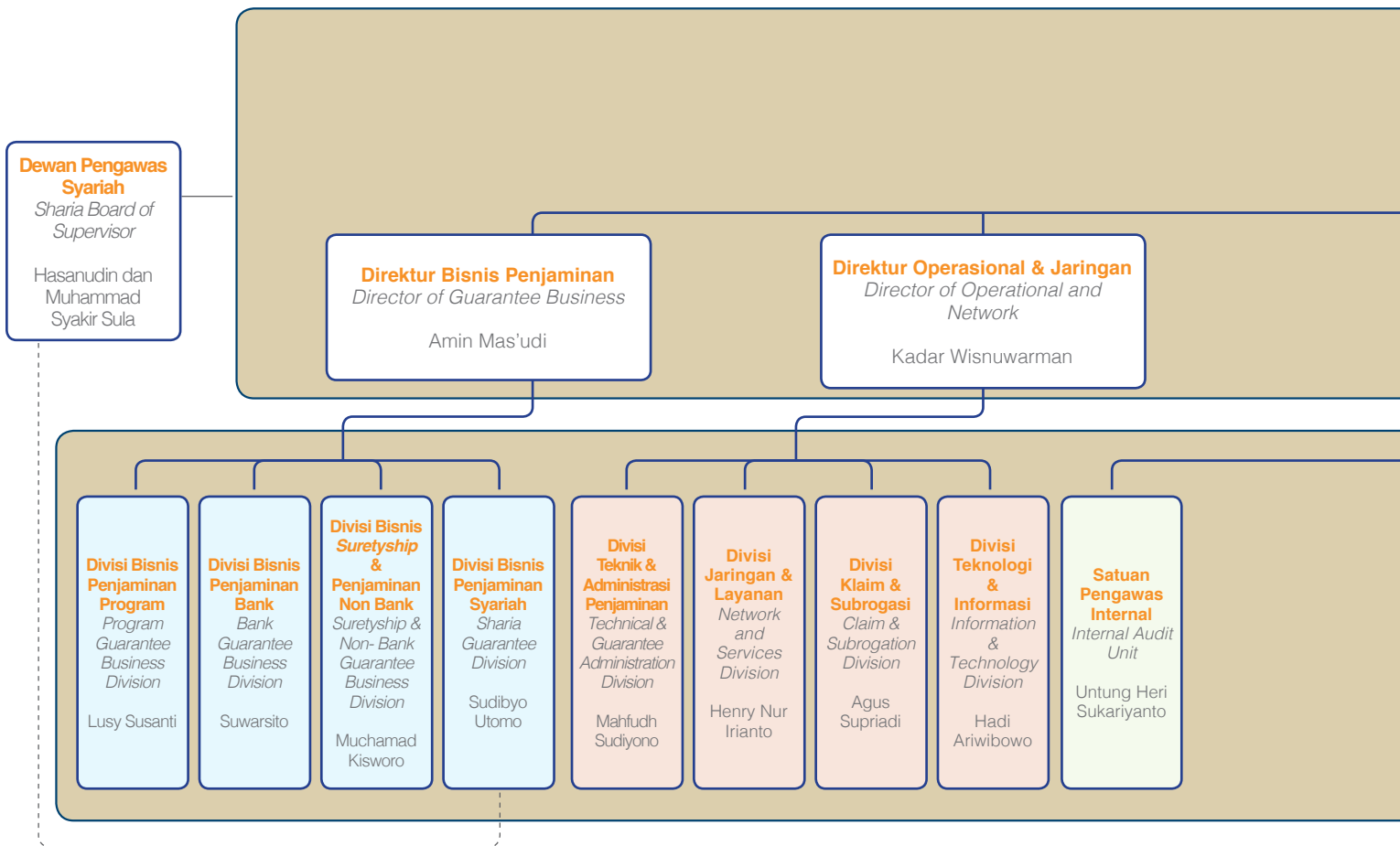
Substances contained in the Company's vision, mission, credo, and corporate culture have been acknowledged and approved by the Board of Supervisors and President Director of the Company.

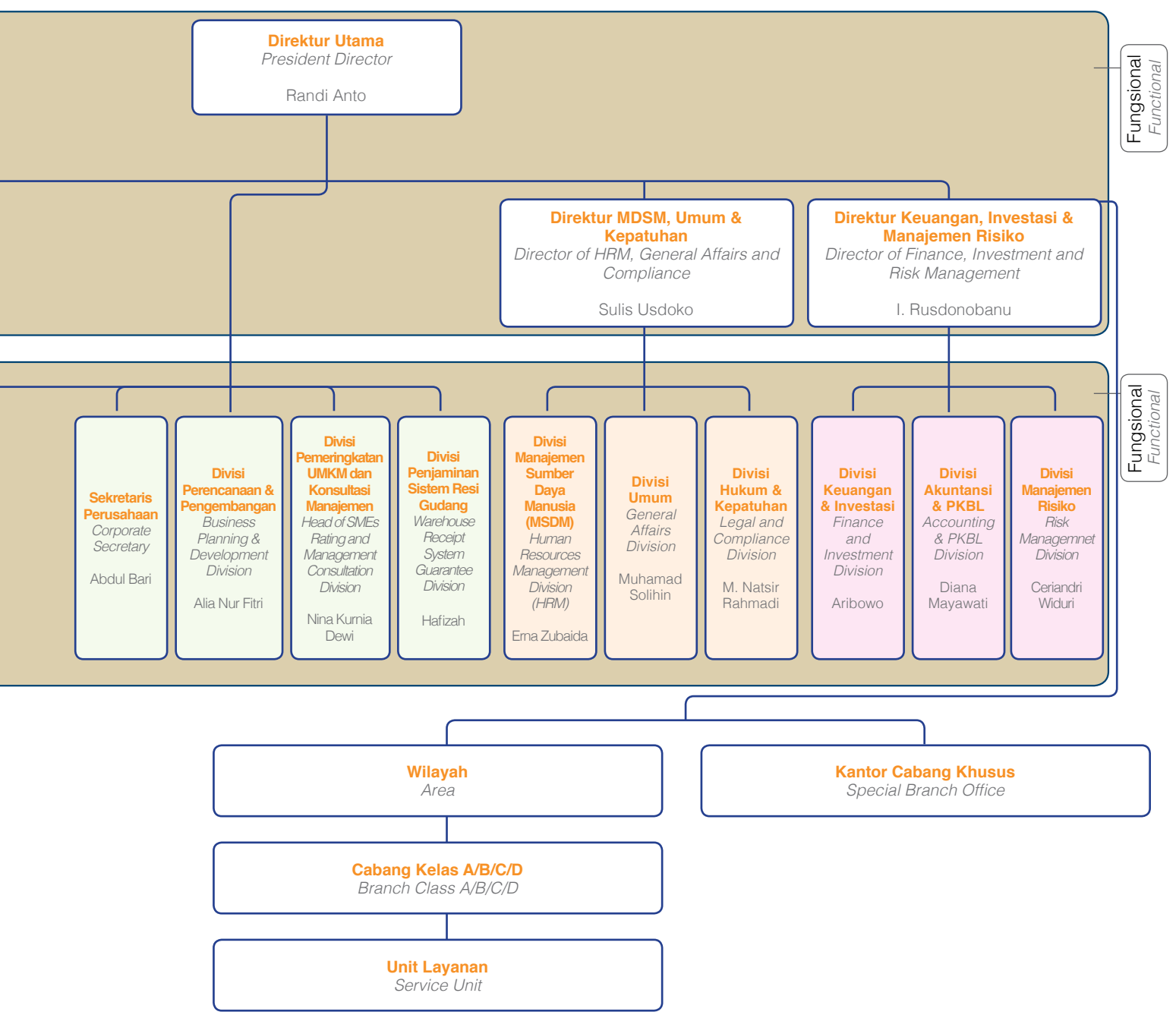
Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 36/Kep-Dir/IV/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Struktur Organisasi.

The Company's Organizational Structure has been validated by the Board of Directors' Decree No. 36/Kep-Dir/IV/2016 dated 20 April 2016 on Organizational Structure.





Bidang Usaha

Line of Business

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR: PENERIMA JAMINAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang menjadi Anggaran dasar Perusahaan, dalam pasal 6, 7, dan 8 disebutkan bahwa Perusahaan memiliki sifat, maksud, dan tujuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.
2. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, dengan melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah, serta Koperasi.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE ARTICLES OF ASSOCIATION: RECIPIENTS OF GUARANTEE

Based on Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee (Jamkrindo) which became the Articles of Association of the Company, in Articles 6, 7, and 8, it is stated that the Company has the following characteristics, purposes, and objectives as follows:

1. Organizing services for public benefit and fostering profits based on the applicable principles of corporate governance.
2. The purposes and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting Government policies and programs in economic and national development sectors, by conducting credit guarantee activities for Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives.

In an effort to achieve these purposes and objectives, the Company may undertake several business activities and business development policies to support financing. The following is the implementation of business activities and business development policies which have been conducted.

Kegiatan Activities	Keterangan Description
Penjaminan kredit baik yang bersifat tunai maupun non-tunai <i>Cash and Non-Cash guarantee</i>	Diberikan bank atau badan usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Given by banks or business entities to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Penjaminan pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan pola bagi hasil <i>Guarantee for lease financing, factoring, consumer financing, and sharing-income financing</i>	Diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Given by financing institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Penjaminan pembelian barang secara angsuran <i>Guarantee for purchasing goods through installment</i>	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Melakukan Penjaminan Syariah atas pembiayaan baik bersifat tunai maupun non-tunai <i>Sharia Guarantee for financing both in the form of cash and non-cash</i>	Diberikan bank atau badan usaha syariah kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Given by banks or sharia business entities to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Penjaminan atas transaksi kontrak jasa <i>Guarantee for service contract transaction</i>	Dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Conducted by Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives</i>
Kegiatan usaha lainnya <i>Other business activities</i>	Penjaminan kredit perorangan, jasa konsultasi, dan jasa manajemen kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi yang sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan <i>Guarantee for personal loans, consultation services, and management services to Micro, Small, and Medium Enterprises and Cooperatives in accordance with the purposes and objectives of the Company</i>



Kegiatan Activities	Keterangan Description
Penjaminan Sistem Resi Gudang <i>Warehouse Receipt System Guarantee</i>	Kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak pemegang Resi Gudang dana tau penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang <i>The activities of providing guarantee which protect the right of the Warehouse Receipt fundholder or the recipient of Guarantee Rights in the event of failure, inability, and or bankruptcy of Warehouse Manager in carrying out its obligations and maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System</i>
Penjaminan Fintech <i>Fintech Guarantee</i>	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh Lender melalui penyelenggara (peer to peer lending) kepada borrower <i>Guarantee for IT-based money lending services delivered by Lender through peer to peer lending to the borrower</i>
Penjaminan Pembiayaan KPR <i>KPR Guarantee</i>	Penjaminan atas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh lembaga keuangan (penerima jaminan) kepada terjamin. <i>Guarantees on housing finance channeled by financial institutions (guarantee recipients) to the guaranteed.</i>

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, Perusahaan memiliki peluang untuk memperluas kegiatan usaha yang dijalankan dan tidak terbatas pada kegiatan usaha pemberian jasa penjaminan kredit, antara lain:

1. Penjaminan Pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya.
2. Penjaminan Kredit dan/atau Pinjaman Program Kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL).
3. Penjaminan Penyaluran Uang Pinjaman dengan Jaminan Gadai dan Fidusia.
4. Penjaminan atas Surat Utang.
5. Penjaminan Transaksi Dagang.
6. Penjaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa (*Surety Bond*).
7. Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi.
8. Penjaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
9. Penjaminan *Letter of Credit* (L/C).
10. Penjaminan Kepabeanaan.
11. Jasa Konsultasi Manajemen terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan.
12. Penyediaan informasi/*database* terjamin terkait dengan Kegiatan Usaha Penjaminan.
13. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.

As stipulated in Minister of Finance Regulation No. 99/PMK.010/2011 dated 8 July 2011 on Changes of Minister of Finance Regulation No. 222/PMK.010/2008 on Credit Guarantee Company and Credit Re-Guarantee Company, the Company has an opportunity to expand its business activities conducted and not limited to business activities of credit guarantee services provision, such as:

1. Guarantee for Loans distributed by Cooperatives to its members.
2. Credit Guarantee and/or Loans Partnership Program distributed by State-Owned Enterprises for Partnership and Community Development Program (PKBL).
3. Guarantee for Loans Disbursement with Lien and Fiduciary Guarantees.
4. Guarantee for Debt Securities.
5. Guarantee for Trade/Commerce Transactions.
6. Guarantee for Goods and/or Services Procurement (*Surety Bond*).
7. Counter Bank Credit Guarantee.
8. Guarantee for Domestic Letter of Credit (SKBDN).
9. Guarantee for Letter of Credit (L/C).
10. Guarantee for Customs.
11. Management Consulting Service related to Guarantee Business Activities.
12. Provision of information/*database* related to Guarantee Business Activities.
13. Other Guarantee after obtaining approval from the Minister.

Produk Usaha Penjaminan

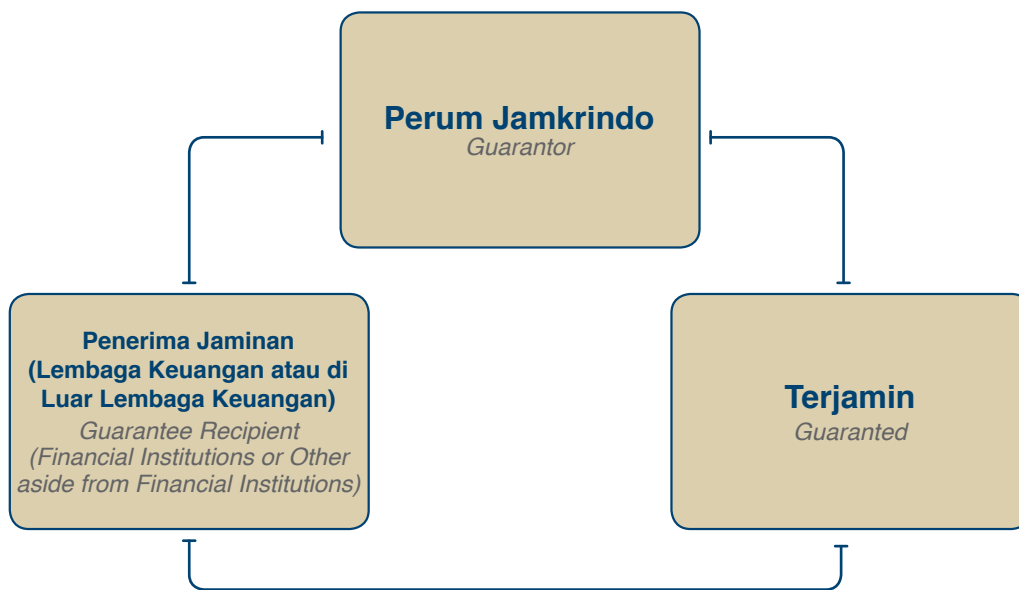
Guarantee Business Products

Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Credit Guarantee is a guarantee provision activity upon fulfilling financial obligations of the Credit Recipients (Guaranteed) to the Guarantee Recipients. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, which are the credit provider business entity called Guarantee Recipients, credit debtor called Guaranteed, and Credit Guarantee Company known as Guarantor.

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambil alihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the acquisition of the failure risk of the Guaranteed in meeting its financial obligations to the Guarantee Recipient, but does not eliminate the financial obligations of the Guaranteed to the Guarantee Recipient until the Guarantee Recipient declares that the loan is settled.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Recipients at the time the loan application from the Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Recipient, but it has not met the banking credit administration requirements, especially regarding the fulfillment of collateral adequacy (*unbankable*).



Jenis-jenis Produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

Types of Guarantee Business Products, among others, are as follows:

Kegiatan Activity	Keterangan Description
Penjaminan Kredit Umum <i>General Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop the business of the Guaranteed (Guarantee process is conducted on a case-by-case basis).</i>
Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah <i>plafond</i> kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan (proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat) <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed, Micro and Small Entrepreneurs, for additional Working Capital and/or Investment in order to increase and develop the business of the Guaranteed, with total credit or financing platforms adjusted in accordance with the applicable micro credit provisions of the Guarantee Recipients (guarantee process is conducted in a Conditional Automatic manner).</i>
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi <i>Counter Bank Credit Guarantee</i>	Pemberian jaminan dalam bentuk kontra garansi atas fasilitas Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin (<i>Principle</i>). <i>Provision of guarantee in the form of counter guarantee over Bank Guarantee's facilities issued by the Guarantee Recipients to the Guaranteed (Principle).</i>
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa <i>Construction Credit Guarantee & Procurement of Goods/Services</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bowheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed for additional Working Capital of construction services and procurement of goods/services in accordance with the work contract between the Guaranteed and Bowheer (project owner), in which the sources of repayment are from the State Budget/Regional Budget/SOE or private sectors.</i>
Penjaminan Distribusi Barang <i>Goods Distribution Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit penyaluran barang dari Penerima Jaminan (produsen barang) kepada Terjamin yang mewajibkan Terjamin untuk melunasi pembayaran dalam jangka waktu tertentu. <i>Guarantee over goods distribution credit from the Guarantee Recipients (goods producers) to the Guaranteed which obliged the Guaranteed to settle the payment within a specific time period.</i>
Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, perorangan (CPNS, PNS, pegawai tetap suatu Perusahaan Swasta/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga <i>channeling</i> , yang sumber pengembaliannya berasal dari gaji tetap Terjamin dengan cara memotong gaji tetap Terjamin (Proses Penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat). <i>Guarantee over credit/financing given by the Guarantee Recipients to the Guaranteed, individuals (candidate of Civil Servants, Civil Servants, permanent employees of Private Companies/Government Institutions), either the distribution is direct or through a channeling institution where the source of repayment comes from the fixed salary of the Guaranteed (Guarantee Process is conducted in a Conditional Automatic manner).</i>
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Guarantee for Micro Credit Program (KUR)</i>	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada UMKM dan Koperasi untuk usaha produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> . Penjaminan Perum Jamkrindo untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan <i>plafond</i> sampai dengan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Mikro sedangkan untuk <i>plafond</i> kredit lebih dari Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) termasuk dalam kategori KUR Ritel. <i>Credit/Financing for working capital and/or investment to SMEs & Cooperatives of feasible and productive business but are not yet bankable. Perum Jamkrindo Guarantee for Micro Credit Program (KUR) with platform up to IDR20,000,000 (twenty million rupiah) is included in Micro KUR category, while for credit platform of more than IDR20,000,000 (twenty million rupiah) up to IDR500,000,000 (five hundred million rupiah) is included in Retail KUR category.</i>



Kegiatan Activity	Keterangan Description
Surety Bond	<p>Suatu perjanjian 3 pihak antara <i>Surety</i> (pihak pertama) atas dasar keyakinannya kepada <i>Principal</i> (Pihak Kedua) secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> (Pihak Ketiga) bahwa apabila <i>Principal</i> oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka <i>Surety</i> akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban <i>Principal</i> tersebut.</p> <p><i>A three-party agreement among the Surety (First Party) on a trust basis to the Principal (Second Party) in which both parties promise to the Obligee (Third Party) that should the Principal by any reason neglect or fail to perform the duty as stipulated in the agreement with the Obligee, the Surety will be responsible to the Obligee for fulfilling the Principal's obligations.</i></p>
Penjaminan Kredit BPR/BPRS <i>BPR/BPRS Credit Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas kredit yang disalurkan perbankan dan/atau badan usaha lainnya kepada BPR. Penjaminan Kredit BPR/BPRS.</p> <p><i>Guarantee over credit distributed by banking and/or other business entities to BPR. BPR/BPRS Credit Guarantee.</i></p>
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP <i>KPR Sejahtera FLPP Guarantee</i>	<p>Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan, dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p><i>Guarantee activities on housing loan distribution, which is a coordination program between the Bank and Ministry of Public Works and Public Housing of Republic of Indonesia with low interest, fixed light installment, and long period of credit for low-income communities.</i></p>
Customs Bond	<p>Perikatan penjaminan antara tiga pihak, pihak pertama (Penjamin/<i>Customs Company</i>) terikat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang timbul dari pihak kedua (Terjamin/<i>Principal</i>) terhadap pihak ketiga (Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>).</p> <p><i>Guarantee engagement among three parties; the First Party (Guarantor/Customs Company) is engaged to fulfill obligations arising from the Second Party (Guaranteed/Principal) to the Third Party (Guarantee Recipient/Obligee).</i></p>
Penjaminan Keagenan Kargo <i>Cargo Agency Guarantee</i>	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>.</p> <p><i>Guarantee given to Guarantee Recipient/Obligee (Transportation Service Provider Company) on the obligation of the Guaranteed/Principal (Cargo Agency) to pay cargo transportation cost to the Guarantee Recipient/Obligee.</i></p>
Penjaminan Invoice Financing <i>Invoice Financing Guarantee</i>	<p>Adalah fasilitas penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga Keuangan kepada <i>Obligee</i> terkait dengan tagihan <i>Supplier</i> dari <i>Obligee</i>. Penjaminan Keagenan Kargo merupakan salah satu bentuk <i>Payment Bond</i> atau Jaminan Pembayaran lainnya.</p> <p><i>Guarantee facility over financing given by Financial Institutions to the Obligee in relation with Supplier bills from the Obligee. Cargo Agency Guarantee is a form of Payment Bond or other Financing Guarantee.</i></p>
Penjaminan Pembiayaan Kendaraan Bermotor <i>Vehicle Financing Guarantee</i>	<p>Penjaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk kredit kendaraan bermotor.</p> <p><i>Guarantee over financing given by Financial Institutions for vehicle credit.</i></p>
Penjaminan Sistem Resi Gudang <i>(Warehouse Receipt System Guarantee)</i>	<p>Kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak pemegang Resi Gudang dan penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan, dan atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang</p> <p><i>The activities of providing guarantee which protect the right of the Warehouse Receipt fundholder or the recipient of Guarantee Rights in the event of failure, inability, and or bankruptcy of Warehouse Manager in carrying out its obligations and maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System</i></p>
Penjaminan Fintech <i>(Fintech Guarantee)</i>	<p>Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh Lender melalui penyelenggara (peer to peer lending) kepada borrower</p> <p><i>Guarantee for IT-based money lending services delivered by Lender through peer to peer lending to the borrower</i></p>
Penjaminan Pembiayaan KPR <i>(KPR Guarantee)</i>	<p>Penjaminan atas pembiayaan perumahan yang disalurkan oleh lembaga keuangan (penerima jaminan) kepada terjamin.</p> <p><i>Guarantees on housing finance channeled by financial institutions (guarantee recipients) to the guaranteed.</i></p>

Kinerja Perum Jamkrindo

Perum Jamkrindo Performance

NERACA

BALANCE SHEET

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
ASET <i>ASSETS</i>					
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalent</i>	4.711.775	5.196.593	5.594.822	5.723.816	5.418.223
Surat Berharga <i>Securities</i>	1.454.002	2.700.064	2.925.022	3.209.124	4.025.861
Piutang IJP <i>IJP Receivables</i>	1.206.227	1.075.355	1.442.622	2.347.025	2.474.754
Piutang Penjaminan Ulang <i>Re-guarantee Receivables</i>	120.584	69.937	97.538	112.346	120.532
Pinjaman yang Diberikan <i>Loans</i>	1.297	973	955	955	776
Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>	27.596	132.732	58.861	81.728	87.892
Beban Dibayar di muka <i>Prepaid Expenses</i>	553.068	598.764	855.522	1.016.173	1.153.990
Properti Investasi <i>Investment Properties</i>	14.981	14.590	-	-	-
Aset Tetap <i>Fixed Assets</i>	37.841	54.425	396.123	441.995	471.169
Aset Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Assets</i>	148.019	128.607	168.754	174.614	177.252
Aset Lain-lain <i>Other Assets</i>	24.509	57.811	102.774	300.641	747.693
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	8.299.900	10.029.851	11.642.993	13.408.418	14.678.143
LIABILITAS <i>LIABILITIES</i>					
Utang Klaim <i>Claim Payables</i>	45.181	10.197	13.067	11.650	75.925
Utang Pajak <i>Tax Payables</i>	24.242	3.525	29.218	72.812	59.550



dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
Cadangan Klaim <i>Claim Reserves</i>	452.122	396.379	321.871	404.959	427.143
Utang Penjaminan Ulang <i>Co-guarantee Payables</i>	41.713	35.822	63.443	66.604	109.687
Pendapatan Ditangguhkan <i>Deferred Revenues</i>	1.103.428	1.019.708	1.615.781	2.346.247	2.638.598
Utang Lain-lain <i>Other Payable</i>	76.558	137.762	105.288	178.409	204.458
Liabilitas Imbalan Kerja <i>Employment Allowance Liabilities</i>	10.155	21.843	18.124	28.168	38.907
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	1.753.398	1.625.236	2.166.792	3.108.849	3.554.268
EKUITAS <i>EQUITY</i>					
Penyertaan Modal Pemerintah <i>Government Capital Investment</i>	5.338.733	6.638.733	7.138.733	7.638.733	7.638.733
Cadangan-cadangan <i>Reserves</i>	757.940	1.130.951	1.515.215	1.828.847	2.471.937
Komponen Ekuitas Lainnya <i>Other Equity Components</i>	(80.745)	(28.284)	196.885	139.930	211.345
Kepentingan Non Pengendali <i>Non-Controlling Interest</i>	-	13	13	13	14
Saldo Laba <i>Retained Earnings</i>	530.574	663.203	625.354	692.045	801.845
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	6.546.502	8.404.615	9.476.201	10.299.569	11.123.875
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i>	8.299.900	10.029.851	11.642.993	13.408.418	14.678.143

Laporan Laba Rugi

Profit (Loss) Statements

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan IJP Bersih <i>IJP Revenues - Net</i>	1.339.639	1.442.570	1.277.488	1.588.441	1.805.686
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	963.393	1.021.058	922.662	871.583	1.004.610
Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee</i>	376.246	421.512	354.825	716.857	801.077
Pendapatan Investasi Bersih <i>Net Investment Income</i>	347.674	531.364	599.525	587.678	601.634
Pendapatan Lain-lain Bersih <i>Other Income - Net</i>	162.647	222.492	307.230	294.070	328.679
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	229.601	329.360	470.528	657.151	708.169
Laba Sebelum Pajak <i>Income Before Tax</i>	656.967	846.007	791.053	941.454	1.023.221
Laba Bersih <i>Net Profit</i>	525.209	663.203	625.354	692.045	801.846
Laba Komprehensif <i>Comprehensive Profit</i>	445.140	715.664	845.163	573.335	859.677



Rasio Keuangan

Financial Ratio



dalam %

in percentage

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	2017
RASIO LIKUIDITAS <i>LIQUIDITY RATIO</i>					
Current Ratio	1010,06%	1351,10%	755,22%	712,07%	769,09%
Rasio Solvabilitas <i>Solvability Ratio</i>					
Hutang terhadap ekuitas <i>Debt to Equity</i>	26,78%	19,34%	22,87%	30,18%	31,95%
RASIO RENTABILITAS <i>PROFITABILITY RATIO</i>					
Margin Laba Kotor <i>Gross Profit Margin</i>	29,36%	31,59%	25,78%	29,75%	28,85%
Margin Laba Penjualan <i>Profit Margin On Sales</i>	39,05%	42,86%	42,14%	43,26%	42,50%
Return on Assets	8,81%	9,23%	7,30%	7,52%	7,29%
Return on Equity	8,10%	7,89%	6,60%	6,72%	7,49%
RASIO AKTIVITAS <i>ACTIVITY RATIO</i>					
Perputaran Aset <i>Assets Turnover</i>	22,56%	21,54%	17,32%	17,37%	17,14%
Jumlah Investasi pada Entitas Asosiasi (dalam jutaan Rupiah) <i>Total Investments in Associates Entity (in IDR million)</i>	347.674	531.364	599.525	587.678	601.634

Analisis Kinerja Perum Jamkrindo

Analysis perum jamkrindo performance

SEGMENT BISNIS PENJAMINAN PROGRAM

Divisi Bisnis Penjaminan Program membawahi jenis produk yang memiliki sumber dana dari pemerintah/subsidi. Produk yang menjadi ranah Divisi Bisnis Penjaminan Program adalah produk KUR dan FLPP.

Produk KUR merupakan kredit program pemerintah yang telah berjalan sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari bank penyalur KUR yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dimana pemerintah memberikan subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) (KUR periode 2007–2014) dan subsidi bunga (KUR periode 2015–saat ini). Pada tahun 2017 KUR memiliki suku bunga sebesar 9% dengan target penerima adalah UMKMK di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Produk KUR terbagi atas 3 jenis yaitu KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR TKI. Untuk tahun 2017, Pemerintah menetapkan target KUR sebesar Rp110 triliun untuk disalurkan melalui perantara 33 Bank Penyalur, 4 perusahaan pembiayaan, 2 koperasi simpan pinjam, serta 10 perusahaan penjamin.

Kredit FLPP merupakan bentuk Penjaminan terhadap Kredit Pemilikan Rumah program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kredit FLPP merupakan kredit dengan suku bunga rendah, cicilan ringan, dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Strategi Segmen Penjaminan Program

Pada tahun 2017, strategi yang dilakukan oleh Divisi Bisnis Penjaminan Program untuk mengembangkan produk KUR dan FLPP antara lain:

1. Meningkatkan ekspansi bisnis penjaminan KUR dan FLPP melalui percepatan negosiasi dengan mitra baru untuk mempercepat penandatanganan PKS, meningkatkan kualitas pelayanan serta responsif terhadap keluhan mitra dan perubahan kebijakan dari Pemerintah.
2. Monitoring aktif bersama Kantor Wilayah dan Kantor Cabang agar pelaksanaan penjaminan KUR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mempercepat SLA (*Service Level Agreement*) dengan Divisi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan Penjaminan KUR *Online*.
4. Meningkatkan kapabilitas karyawan untuk mendorong produktivitas melalui motivasi dan pelatihan kerja.

GUARANTEE PROGRAM BUSINESS SEGMENT

Program Guarantee Business Division oversees the type of product which has funding sources from government/subsidies. The products which is included in the Program Guarantee Business Division are Micro Credit Loan and FLPP products.

Micro Credit Loan product is a government credit program which has been in operation since 2007 with funding source from Micro Credit Loan distributing banks directly appointed by the government in which the government provides the Subsidy for Guarantee Fee (IJP) (KUR period of 2007-2014) and Interest Subsidy (KUR period of 2015-recently). In 2017 Micro Credit Loan has an interest rate of 9% with target recipients are SMEs in agriculture, fisheries, processing industries, trade, and services. Micro Credit Loan (KUR) products are divided into 3 types namely Micro KUR, Retail KUR, and KUR for Indonesian Workers (TKI). In 2017, the Government set a target of IDR110 trillion of Micro Credit Loan to be distributed through an intermediary of 33 distribution banks, 4 finance companies, 2 savings and loan cooperatives, and 10 guarantee companies.

FLPP Credit is a form of Guarantee to Housing Loan. It is a cooperative program between Banking Parties with Ministry of Public Works and People's Housing. FLPP Credit is a credit with low-interest rate, and small and fixed installment method throughout the credit period intended for Low-Income Communities.

Program Guarantee Segment Strategy

In 2017, the strategies undertaken by the Program Guarantee Business Division to develop Micro Credit Loan (KUR) and FLPP products include:

1. Enhancing the business expansion of KUR and FLPP guarantee through the acceleration of negotiations with new partners to accelerate the signing of MoA, improve service quality and be responsive to partner complaints and policy changes from the Government.
2. Active monitoring of the implementation of KUR guarantee to be in accordance with applicable regulations with Regional Offices and Branch Offices
3. Accelerating the SLA (*Service Level Agreement*) with other Divisions related to the problems which often appear in the implementation of Online KUR guarantee.
4. Improving employee capability to encourage productivity through motivation and job training.

Segmen Bisnis Penjaminan Non Program

Non-Program Guarantee Business Segment

KINERJA SEGMENT BISNIS PENJAMINAN NON-PROGRAM

Selain menjamin kredit program, Perum Jamkrindo juga melakukan bisnis penjaminan *Non-Program*, atau biasa disebut penjaminan eksisting. Bisnis penjaminan Kredit *Non-Program* merupakan bisnis penjaminan yang selama ini diciptakan dan dikembangkan sendiri oleh perusahaan mengikuti kebutuhan pihak penyalur kredit, baik itu bank maupun *non-bank*.

Perum Jamkrindo melakukan penjaminan kredit *Non-Program*, baik yang dilakukan secara tunai ataupun *non-tunai*. Penjaminan kredit secara tunai merupakan penjaminan yang permohonannya diajukan langsung oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, sementara itu Penjaminan Kredit *non-tunai* merupakan penjaminan yang permohonannya harus melalui penerima jaminan baik itu bank ataupun *non-bank*.

Saat ini Bisnis penjaminan Kredit *Non-Program* dikelola oleh Divisi Bisnis Penjaminan Bank, Divisi Bisnis Suretyship, dan Penjaminan *Non-Bank* serta Divisi Bisnis Penjaminan Syariah untuk skema penjaminan yang dilakukan dengan akad syariah.

Penjaminan Bank

Penjaminan bank berfokus kepada penjaminan yang diperuntukkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Adapun produk-produk yang ditawarkan kepada calon mitra kerja, antara lain:

1. Penjaminan kredit Multiguna
2. Penjaminan kredit Umum
3. Penjaminan kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa
4. Penjaminan kredit Mikro
5. Penjaminan kredit KPR
6. Penjaminan kredit *Supply Chain Financing*
7. *Capital Management Guarantee* (CMG)

NON-PROGRAM GUARANTEE BUSINESS SEGMENT PERFORMANCE

In addition to providing guarantees for program credit, Perum Jamkrindo also conducts non-program guarantee business or commonly called Existing Guarantee. Non-Program Credit Guarantee business is a guarantee business which has been created and developed by the company to follow the needs of credit distributors, whether banks or non-banks.

Perum Jamkrindo guarantees Non-Program loans, either cash or non-cash. Cash Credit Guarantee is a guarantee of which the petition is submitted directly by Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives, while non-cash Credit Guarantee is a guarantee of which application must be submitted through the beneficiary of either bank or non-bank guarantee.

Currently, Non-Program Credit Guarantee is managed by Bank Guarantee Business Division, Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division, and Sharia Guarantee Business Division for guarantee scheme with sharia contract

Bank Guarantee

Bank guarantee is focused on the guarantee intended for the actors of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprises. The products offered to prospective partners, among others, are:

1. Multipurpose Credit Guarantee
2. General Credit Guarantee
3. Credit Guarantee for Construction and Goods/Services Procurement
4. Micro Credit Guarantee
5. KPR (Housing Loans) Guarantee
6. Supply Chain Credit Guarantee
7. Capital Management Guarantee (CMG)



Strategi Segmen Penjaminan Bank

Divisi Bisnis Penjaminan Bank melakukan kerjasama dengan bank-bank baik Bank BUMN, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka penjaminan kredit yang disalurkan oleh bank-bank tersebut. Bisnis penjaminan kredit ini juga sangat diminati oleh perusahaan Asuransi, dengan demikian Divisi Bisnis Penjaminan Bank melakukan strategi pemasaran yang dilakukan pada 2017, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pangsa pasar produk penjaminan Bank *Non-KUR*
 - a. Diversifikasi Produk Penjaminan
 - b. *Bundling product* dan Penguatan *Co-Branding*
 - c. Fokus kepada produk-produk penjaminan jangka pendek
 - d. Melakukan sentralisasi produk penjaminan di salah satu kantor cabang
2. Optimalisasi kinerja pemasaran melalui jaringan kerja yang ada seperti Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
 - a. Melakukan *market mapping* terhadap mitra kerja
 - b. Optimalisasi dan evaluasi agen penjaminan
 - c. Melakukan kerjasama dengan mitra bank baru
 - d. *Gathering* antara Perum Jamkrindo dengan mitra Bank.
 - e. Mengutamakan Penjaminan melalui *Online System*

Sejalan dengan Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dimana disebutkan bahwa penjaminan kredit oleh Perum Jamkrindo dapat menurunkan ATMR Bank, yang berarti bahwa bank hanya dikenakan bobot risiko 20% pada perhitungan ATMR. Yang secara tidak langsung akan berdampak pada perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Atas dasar tersebut Divisi Bisnis Penjaminan Bank kemudian mengincar beberapa perbankan yang masih memiliki nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di bawah yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Penjaminan kredit yang dapat menurunkan bobot nilai ATMR dengan menawarkan produk penjaminan Capital Management Guarantee (CMG).

Bank Guarantee Segment Strategy

The Bank Guarantee Business Division cooperates with state-owned banks, national private banks (BUSNs), regional development banks (BPD), and rural banks (BPRs) in the framework of credit guarantees disbursed by these banks. Credit guarantee business also intrigues insurance companies. Because of that, the Bank Guarantee Business Division conducts the following marketing strategy in 2017:

1. Increase market share of guarantee products of Non-KUR Banks
 - a. Diversification Guarantee Product
 - b. Bundling product and Co-Branding Reinforcement
 - c. Focus on short-term guarantee products
 - d. Centralized guarantee products in one branch office
2. Optimize marketing performance through existing networks such as Branch Offices and Regional Offices.
 - a. Conduct market mapping on partners
 - b. Optimization and evaluation of guarantee agencies
 - c. Cooperate with new partners
 - d. Conduct Gathering between Perum Jamkrindo and Bank Partners.
 - e. Priority Guarantee through Online System

In line with FSA Circular Letter No. 42/SEOJK.03/2016 dated September 28, 2016, Concerning Guidelines on Weighted Assets Calculation According to Credit Risk by Using the Standard Approach which states that credit guarantee by Perum Jamkrindo may decrease the Bank's ATMR, this means that banks are only subject to 20% risk weight on the calculation of RWA. This indirectly affects the calculation of Capital Adequacy Ratio (CAR). On that basis, the Bank Guarantee Business Division then targeted several banks which still have the Capital Adequacy Ratio (CAR) value under which has been stipulated by the Financial Services Authority (OJK) through Credit Guarantee that can reduce the weight of the value of ATMR by offering a guarantee product of Capital Management Guarantee (CMG).

Kinerja Segmen Penjaminan Bank

Performance of Bank Guarantee Segments

VOLUME PENJAMINAN BISNIS PENJAMINAN BANK

GUARANTEE VOLUME OF BANK GUARANTEE BUSINESS

No	Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian Achievement	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
			RKAP	Realisasi Realization		
1	Multiguna Multipurpose	7.017.338	8.500.000	3.001.114	70,28%	(23,60%)
2	Umum Commercial	1.063.590	2.405.000	980.897	40,79%	(7,77%)
3	Mikro Micro	1.730.889	2.960.000	2.422.710	81,85%	39,97%
4	Konstruksi Construction	3.189.235	2.997.000	2.580.135	86,09%	(19,10%)
5	Supply Chain	142.863	1.000.000	22.826	2,28%	(84,02%)
6	KPR Housing Loans	35.836	296.000	20.345	6,87%	(43,23%)
7	CMG	10.903.350	14.800.000	8.438.322	57,02%	(22,61%)
Jumlah Total		34.083.101	42.958.000	27.466.349	63,94%	(19,41%)

Tahun 2017, volume penjaminan Divisi Bisnis Penjaminan Bank mencapai Rp27.466 miliar. Namun dengan pencapaian tersebut, Divisi Bisnis Penjaminan Bank belum berhasil melampaui target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 yang ditetapkan sebesar Rp42.958 miliar atau dengan pencapaian hanya sebesar 63,94%. Dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 19%. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terhentinya penjaminan di Bank Mandiri karena belum melalui prosedur Pelaporan Aktivitas Baru (PAB) Otoritas Jasa Keuangan sehingga beberapa produk penjaminan seperti produk kredit Serbaguna Mikro yang mempunyai potensi +/- Rp 2 triliun per tahun dan Kredit Usaha Mikro yang mempunyai potensi +/- Rp 0,3 triliun per tahun belum dapat dilakukan.
2. Penurunan penjaminan CMG Bukopin pada tahun 2017, yaitu dari Rp10,9 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp7,9 triliun pada tahun 2017.
3. Belum berjalannya penjaminan kredit konstruksi Bank Mandiri dengan potensi + Rp0,9 triliun per tahun.
4. Penurunan atau penghentian penjaminan KMG beberapa BPD karena batasan biaya akuisisi oleh OJK dan keterbatasan *underwriting life insurance* menyangkut batasan usia, *plafond* kredit, dan persaingan tarif.
5. Perubahan pola penjaminan beberapa BPD dari secara langsung menjadi menggunakan *broker*, mengakibatkan turun atau berhenti sama sekali.

In 2017, the guarantee volume of the Bank Guarantee Business Division reached IDR27,466 billion. However, with this achievement, the Bank Guarantee Business Division has not managed to exceed the target of Corporate Plan and Budget (RKAP) of 2017 set at IDR42.958 billion. In other words, the division only managed to achieve 63.94% of the target. Compared with the achievement of the previous year, there was a decline of 19%. The decline was caused by several factors, such as:

1. The termination of guarantee in Bank Mandiri since it has not been through the New Financial Service Activity Reporting (Pelaporan Aktivitas Baru/PAB) of OJK so that some guarantee products such as Multipurpose Micro Credit products have a potential of +/- IDR2 trillion per year and Micro Business Loans with potential of +/- IDR0.3 trillion per year still cannot be executed.
2. The decrease of the Bukopin CMG guarantee in 2017, from IDR10.9 trillion in 2016 to IDR7.9 trillion in 2017.
3. Bank Mandiri's construction credit guarantee has not yet started with a potential of IDR0.9 trillion per year.
4. Decrease or termination of KMG guarantee of some BPD due to the limitation of acquisition cost and limitations of *underwriting life insurance* regarding age limit, credit limit, and tariff competition by IJK
5. Changes in the guarantee pattern of multiple BPDs from a direct method into using a broker, resulting in a decrease or stoppage of guarantee.



Imbal Jasa Penjaminan Bisnis Penjaminan Bank

Guarantee Fee of Bank Guarantee Business

No	Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian Achievement	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
			RKAP	Realisasi Realization		
1	Multiguna Multipurpose	435.360	499.500	286.219	57,30%	(34,26%)
2	Umum Commercial	15.623	72.150	12.468	17,28%	(20,19%)
3	Mikro Micro	42.809	88.800	52.011	58,57%	21,50%
4	Konstruksi Construction	32.155	40.460	26.340	65,10%	(18,08%)
5	Supply Chain	1.007	13.500	81	0,60%	(91,92%)
6	KPR Housing Loans	837	6.660	350	5,25%	(58,24%)
7	CMG	38.162	74.000	30.285	40,93%	(20,64%)
Jumlah Total		565.952	795.070	407.755	51,29%	(27,95%)

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan dari Divisi Bisnis Penjaminan Bank pada tahun 2017 mencapai Rp407 miliar, mengalami penurunan sebesar 27% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp565 miliar. Pencapaian tahun 2017 hanya mencapai 51,29% dari target RKAP 2017 yang ditetapkan sebesar Rp795 miliar diakibatkan penurunan volume penjaminan yang dicapai.

The Revenue on Guarantee Fee of the Bank Guarantee Business Division in 2017 reached IDR407 billion. It was a decrease of 27% compared to the previous year which amounted to IDR565 billion. The achievement in 2017 only reached 51.29% of the set target of RKAP 2017 at IDR795 billion was attributable to the decrease in guaranteed volume.

Prospek Segmen Penjaminan Bank

Perum Jamkrindo tetap konsisten membantu pertumbuhan UMKMK di tahun 2018 dan memperluas pasar penjaminan dengan cara membuka kerjasama baru baik dengan mitra perbankan yang sudah bekerjasama untuk produk-produk baru maupun mitra perbankan yang belum bekerjasama sama sekali. Pasar UMKM yang masih sangat besar untuk digali merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang akan berbanding lurus dengan pertumbuhan penyaluran kredit oleh perbankan dan penjaminan kredit oleh Jamkrindo.

Bank Guarantee Segment Outlook

Perum Jamkrindo remains consistent in assisting the growth of SMEs in 2018 and expanding the guarantee market by opening new partnerships with banking partners already working on new products and banking partners who have not formed a cooperation with the corporation. The ever expansive potential market of SMEs market is one of the motors of economic growth which will be directly proportional to the growth of credit distribution by banks and credit guarantee by Jamkrindo.

Pada 2016, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57.896 juta dengan pertumbuhan sebesar 2,41% (www.bps.go.id). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM di Indonesia mencapai 57%. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Divisi Bisnis Penjaminan Bank memiliki beragam produk yang diharapkan dapat mengakomodir permintaan pasar. Selain produk penjaminan yang telah ada saat ini, Divisi Bisnis Penjaminan juga kini memiliki produk CMG yang merupakan produk penjaminan atas portofolio kredit dalam satu *coverage* penjaminan.

In 2016, the number of SMEs in Indonesia reached 57,896 million with a growth of 2.41% (www.bps.go.id). Based on data from the Ministry of Cooperatives and SMEs, the contribution of SMEs in Indonesia reached 57%. To maximize this potential, the Bank Guarantee Business Division has a variety of products which are expected to accommodate market demand. In addition to the current guarantee products, the Guarantee Business Division also now has CMG products which are the guarantee products of loan portfolio under one guarantee coverage.



Bank Indonesia menetapkan suku bunga *7-Days Repo Rate* di angka 4,25%, yang kemudian menjadi suku bunga acuan baik simpanan maupun pinjaman. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan suku bunga *7-Days Repo Rate* di tahun 2017 yang mencapai 4,75%. Penurunan tersebut berdampak pada penurunan suku bunga kredit perbankan. Penurunan suku bunga kredit, berkorelasi dengan penurunan tarif IJP karena komponen suku bunga kredit mencakup tarif IJP di dalamnya. Sehingga apabila suku bunga turun, tarif IJP pun menurun. Namun di lain pihak, penurunan suku bunga kredit juga diharapkan dapat meningkatkan pencairan kredit sehingga kuantitas penjaminan bertambah dan penurunan profit dapat dihindari.

Segmen Divisi Bisnis Penjaminan Bank adalah bank penyalur kredit UMKMK yang terbagi atas Bank BUMN, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Saat ini, Perum Jamkrindo telah bekerjasama dengan 4 Bank BUMN, 25 BPD, 15 BUSN, dan 2 BPR.

Divisi Bisnis Penjaminan Bank bermaksud untuk menjalin kerjasama dengan bank-bank yang telah bermitra tersebut dalam rangka perluasan penjaminan terhadap jenis kredit lain yang dimiliki oleh bank tersebut serta memperluas pemasaran produk-produk penjaminan kepada mitra-mitra baru yang belum ada kerjasama dengan Perum Jamkrindo.

Kinerja Segmen Penjaminan Syariah

Tahun 2017, segmen penjaminan syariah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dibandingkan tahun 2016, kinerja segmen bisnis penjaminan syariah mengalami pertumbuhan sebesar 196% dengan realisasi Volume Penjaminan mencapai Rp5,9 triliun. Pencapaian tersebut setara dengan 139% dari RKAP.

Bank Indonesia set the 7-Days Repo Rate at 4.25%, which then became the benchmark interest rate for both deposits and loans. This figure decreased compared to the 7-Days Repo Rate rate in 2017 which reached 4.75%. The decline had an impact on the decline in bank lending rates. The decline in loan interest rates correlated with the decrease in the IJP tariffs as the lending rate component covers the IJP rate in it. So, if the interest rate falls, the IJP tariff decreases. On the other hand, the decline in loan interest rates is also expected to increase credit disbursement so that the guarantee quantity increases and the decrease in profit can be avoided.

Bank Guarantee Business Division Segment is a credit distributing banks of SMEs which are divided into SOEs (BUMN) Banks, Regional Development Banks (BPD), Private National Commercial Banks (BUSN), and Rural Banks (BPR). Currently, Perum Jamkrindo has cooperated with 4 BUMNs, 25 BPDs, 15 BUSNs, and 2 BPR banks.

Bank Guarantee Business Division intends to establish cooperation with the partnered banks in order to extend the guarantee of other types of credit held by the bank and extend the marketing of guarantee products to new partners not yet in cooperation with Perum Jamkrindo.

Performance of Syariah Guarantee Segment

In 2017, the Syariah guarantee segment showed a very good performance. Compared to 2016, the performance of the Syariah business segment grew by 196% with the realization of Guarantee Volume reaching IDR5,9 trillion. This achievement is equivalent to 139% of RKAP.

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
Pembiayaan Mikro <i>Micro Financing</i>	204.542,9	235.667	67.350,3	29%	33%
Pembiayaan Umum <i>General Financing</i>	15.384,0	18.530	19.600,0	106%	127%
Pembiayaan Konstruksi & PBJ <i>Financing on Construction and Procurement of Goods and Services</i>	35.149,5	37.500	25.622,5	68%	73%
Pembiayaan Multiguna <i>Multipurpose Financing</i>	1.086.506,8	1.579.970	1.162.640,6	74%	107%



dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
Pembiayaan Mikro Multiguna Micro Multipurpose Financing	3.695,6	-	667,0	100%	18%
Kontra Bank Garansi Counter Bank Guarantee	359.010,1	660.600	917.784,4	139%	256%
Pembiayaan FLPP FLPP Financing	1.348.374,3	1.600.000	3.571.396,1	223%	265%
KPR Housing Loans	-	-	3.870,0	100%	100%
Pembiayaan Arrum Arrum Financing	-	-	211.240,5	100%	100%
Pembiayaan Otto Automotive Financing	-	157.168	-	0%	0%
Jumlah Total	3.052.663,3	4.289.435	5.980.171,6	139%	196%

Imbal Jasa Kafalah Bisnis Penjaminan Syariah

Kafalah Fee of Syariah Guarantee Business

dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
Non-Program					
Pembiayaan Mikro Micro Financing	3.848,9	5.040,3	1.396,3	28%	36%
Pembiayaan Umum General Financing	323,5	610,9	574,2	94%	177%
Pembiayaan Konstruksi & PBJ Financing on Construction and Procurement of Goods and Services	307,5	316,2	269,2	85%	88%
Pembiayaan Multiguna Multipurpose Financing	25.108,9	33.212	21.683,7	65%	86%
Pembiayaan Mikro Multiguna Micro Multipurpose Financing	69,1	-	13,3	100%	19%
Kontra Bank Garansi Counter Bank Guarantee	3.041,4	6.279,5	8.760,4	140%	288%
KPR Housing Loans	-	-	79,9	100%	100%
Pembiayaan Arrum Arrum Financing	-	-	3.916,9	100%	100%
Pembiayaan Otto Automotive Financing	-	-	-	0%	0%
Program					
Pembiayaan FLPP FLPP Financing	3.236,1	3.840	8.594,7	224%	266%
Jumlah I Total	35.935,4	50.556,9	45.288,7	90%	126%



Jumlah pendapatan Imbal Jasa Kafalah Penjaminan Syariah tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 26% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp36 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp45 miliar pada tahun 2017. Namun demikian, pencapaian tersebut masih berada di bawah target RKAP 2017 yang ditetapkan sebesar Rp50 miliar atau dengan pencapaian sebesar 90% dari RKAP 2017.

KINERJA BISNIS SURETYSHIP DAN PENJAMINAN NON-BANK

Divisi bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank adalah divisi yang membawahi produk penjaminan *suretybond*, *customs bond*, *payment bond*, kontra bank garansi, keagenan kargo, dan penjaminan atas penyaluran *Cash Loan/Non-Cash Loan* dari lembaga keuangan *non-bank*.

Produk Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank:

1. Penjaminan *Suretyship*
 - a. Penjaminan *Surety Bond*
 - b. Penjaminan *Customs Bond*
 - c. Penjaminan *Payment Bond*
 - d. Penjaminan Keagenan Kargo
 - e. Kontra Bank Garansi
2. Penjaminan *Non-Bank*
 - a. Penjaminan Kredit Umum
 - b. Penjaminan Kredit Mikro
 - c. Penjaminan Kredit Multiguna
 - d. Penjaminan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
 - e. Penjaminan Otomotif (Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
 - f. Penjaminan Kredit Konstruksi
 - g. Penjaminan *Supply Chain Financing/Invoice Financing/Anjak Piutang/Factoring*
 - h. Penjaminan Distribusi Barang
 - i. Penjaminan *Peer to Peer Lending*

The total revenues of Kafalah Fee of Syariah Guarantee in 2017 increased by 26% compared to the previous year, from IDR36 billion in 2016 to IDR45 billion in 2017. Nevertheless, the achievement is still below the target of 2015 RKAP set at IDR50 billion. In other words, it only achieved 90% of the 2017 RKAP.

SURETYSHIP AND NON-BANK GUARANTEE BUSINESS PERFORMANCE

The Suretyship and Non-bank Guarantee Business Division is a division handling guarantee products of surety bonds, customs bond, payment bond, counter bank guarantees, cargo agency and guarantee for Cash Loan / Non-Cash Loan distribution from non-bank financial institutions.

The products of Suretyship and Non-bank Guarantee Business Division are:

1. Suretyship Guarantee
 - a. Surety Bond Guarantee.
 - b. Custom Bond Guarantee.
 - c. Payment Bond Guarantee.
 - d. Cargo Agency Guarantee.
 - e. Counter Bank Guarantees.
2. Non-bank Guarantee
 - a. General Credit Guarantee.
 - b. Micro Credit Guarantee.
 - c. Multipurpose Credit Guarantee.
 - d. KPR (Housing Loans) Guarantee.
 - e. Automotive guarantee.
 - f. Credit Guarantee for Construction.
 - g. Supply Chain Financing/Invoice/Factoring Credit Guarantee.
 - h. Goods Distribution Guarantee.
 - i. Peer to Peer Lending Guarantee.



Strategi Segmen Penjaminan Non-Program

Memperkuat jaringan agen penjaminan *suretyship* yang tersebar dengan skema SaKa-SaKi (Satu Kabupaten Satu Kaki). Menjalin kerjasama dengan mitra kerja baru untuk penjaminan produk yang tersedia dan melakukan sosialisasi produk-produk penjaminan tersebut kepada mitra *existing*, serta melakukan *maintenance* secara intensif atas produk-produk penjaminan yang telah berjalan.

Kinerja Segmen Penjaminan Non-Program

Volume Penjaminan Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank tahun 2017 telah mencapai Rp27,44 triliun atau setara dengan 97,99% dari RKAP 2017. Meskipun belum melebihi target RKAP 2017 namun pertumbuhan volume Penjaminan Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank mencapai 33,93%, sedang untuk Imbal Jasa Penjaminan di tahun 2017 Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank berhasil melebihi target RKAP 2017 sebesar 102,57% atau setara dengan Rp277,95 miliar tumbuh 56,29% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan Volume Penjaminan dan Imbal Jasa Penjaminan yang cukup signifikan ini salah satu nya dikarenakan telah dilakukannya sinergi BUMN untuk produk *Payment Bond* dengan ditandatangani Perjanjian kerjasama dengan PT Telkom (Telekomunikasi Indonesia) Divisi Business Service. Selain itu, Perum Jamkrindo kembali melakukan sinergi BUMN dengan Kliring Berjangka Indonesia (KBI) untuk produk Jaminan Risiko Transaksi (JRT) Dalam Pasar Lelang Gula Rafinasi dan MoU dengan PT SIER. Realisasi kegiatan atas seluruh kodifikasi produk-produk penjaminan sampai dengan periode triwulan IV tahun 2017 adalah penandatanganan PKS sekaligus sosialisasi/demo aplikasi penjaminan *online* dengan mitra baru yakni PT Indosurya Inti Finance, PT Radana Bhaskara Finance, PT Pupuk Kujang dan PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, PT Investree Radhika Jaya, PT Mandiri Tunas Finance, PT Suzuki Finance Indonesia, PT Tifa Finance, MoU PT Sarana Multigria Financial, dan MoU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Inisiasi kerjasama juga telah dilakukan dengan berbagai calon mitra *multifinance* seperti PT Mega Auto Finance, PT Indomobil Finance, PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus), PT Artha Prima, PT Bintang Mandiri Finance, PT Transpasific Finance, PT Mashill Finance, PT Shinhan Indo Finance, PT Esta Dana Ventura, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPM-UKP), dan PT Adira Dinamika Multi Finance. Sedangkan *maintenance* dilakukan dengan membina hubungan baik yang telah terbentuk selama ini dengan mitra penjaminan eksisting.

Non-program Guarantee Segment Strategy

Strengthen the network of suretyship guarantee agents with the SaKa-SaKi scheme (One District-One Branch). Establish cooperation with new partners to guarantee the available products and socialize the guarantee products to the existing partners, and conduct intensive maintenance of the current guarantee products.

Performance of Non-program Guarantee Segment

The volume of transaction of Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division in 2017 has reached IDR27.44 trillion, which is equivalent to 97.99% of RKAP 2017. Although it has not exceeded the target of RKAP 2017, the Suretyship and Non-Bank Business Surety Division Survey has grown by 33, 93%, while for the Return of Assurance Services in 2017 the Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division has been successful in exceeding the target of RKAP 2017 of 102.57% or equivalent to IDR277.95 billion. This is a growth of 56.29% compared to the previous year. The significant increase of the volume of Guarantee and Guarantee Fee is one of the reasons for the synergy of SOEs for Payment Bond products with signed Agreement of cooperation with PT Telkom (Telekomunikasi Indonesia) Business Service Division. In addition, Perum Jamkrindo again synergizes with another SOEs namely PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) for Transaction Risk Guarantee (JRT) products in Pasar Lelang Gula Rafinasi and MoU with PT SIER. The realization of activities on all the codification of guarantee products up to the fourth quarter of 2017 is the signing of MoA as well as socialization/demo of online guarantee application with new partner, PT Indosurya Inti Finance, PT Radana Bhaskara Finance, PT Pupuk Kujang and PT Semen Padang, PT Semen Baturaja, PT Investree Radhika Jaya, PT Mandiri Tunas Finance, PT Suzuki Finance Indonesia, PT Tifa Finance, MoU signing with PT Sarana Multigria Financial, and MoU signing with Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Initiation of cooperation has also been established with various prospective multi finance partners such as PT Mega Auto Finance, PT Indomobil Finance, PT Finansia Multi Finance (Kredit Plus), PT Artha Prima, PT Bintang Mandiri Finance, PT Transpasific Finance, PT Mashill Finance, PT Shinhan Indo Finance , PT Esta Dana Ventura, Marine and Fisheries Business Capital Management Agency (LPM-UKP), and PT Adira Dinamika Multi Finance. Maintenance is done by fostering good relationships with existing guarantee partners.



Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank melakukan Inisiasi kerjasama dengan mitra *non-multifinance* mengarah kepada Industri *Financial Technology*, dengan didapatkannya izin Otoritas Jasa Keuangan tentang Penjaminan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dengan surat No. S-3588/NB.111/2017. Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank telah melakukan inisiasi kerjasama kepada Modalku, Koinworks, Crowdo, Amarnya, dan Investree.

With the acquisition of the permit from the Financial Services Authority regarding Information Technology-Based Financing Guarantee the Suretyship and Non-bank Guarantee Business Division initiates cooperation with non-multi finance partners on Financial Technology Industry, as stated in its circular letter No. S-3588/NB.111/2017.. The Suretyship and Non-bank Guarantee Business Division has initiated cooperation with Modalku, Koinworks, Crowdo, Amarnya, and Investree.

Volume Pembiayaan Bisnis Penjaminan Non-Program

The volume of Non-Program Guarantee Business Financing

Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
CUSTOMS BOND	84.825,62	200.000,00	100.540,02	50,27%	18,53%
DISTRIBUSI BARANG GOODS DISTRIBUTION	-	1.000.000,00	43.120,43	4,31%	0,00%
KEAGENAN KARGO CARGO AGENCY	71.431,00	90.000,00	67.401,00	74,89%	(5,64%)
KREDIT KPR MNC MNC HOUSING LOANS CREDIT	117.309,78	130.000,00	55.143,43	42,42%	(52,99%)
KREDIT MIKRO MICRO CREDIT	1.236.533,99	1.200.000,00	1.615.075,21	134,59%	30,61%
KREDIT MIKRO BAV BAV MICRO CREDIT	455.258,00	450.000,00	613.482,90	136,33%	34,75%
KREDIT MULTIGUNA MULTIPURPOSE CREDIT	365.773,00	500.000,00	565.303,93	113,06%	54,55%
KREDIT OTO AUTOMOTIVE CREDIT	2.063.553,33	7.000.000,00	5.182.718,39	74,04%	151,16%
KREDIT UMUM COMMERCIAL CREDIT	48.470,14	35.000,00	57.232,75	163,52%	18,08%
PAYMENT BOND	133.539,79	70.000,00	517.746,21	739,64%	287,71%
PEMBIAYAAN INVOICE INVOICE FINANCING	19.368,37	25.000,00	42.471,86	169,89%	119,28%
SUPERMIKRO SUPERMICRO	843.994,00	300.000,00	3.715.606,01	1.238,54%	340,24%
SURETYBOND	9.041.695,48	9.000.000,00	8.849.251,02	98,33%	(2,13%)
KREDIT KONTRA BANK GARANSI COUNTER BANK GUARANTEE CREDIT	6.005.164,27	8.000.000,00	6.012.357,56	75,15%	0,12%
TOTAL	20.486.916,79	28.000.000,00	27.437.450,72	97,99%	33,93%



Imbal Jasa Penjaminan Bisnis Penjaminan Non-Program

Guarantee Fee of Non-program Guarantee Business

Produk Product	Realisasi 2016 Realization in 2016	2017		Pencapaian RKAP Achievement against RKAP	Pertumbuhan (penurunan) Growth (Decrease)
		RKAP	Realisasi Realization		
CUSTOMS BOND	798,33	1.999,27	914,85	45,76%	14,60%
DISTRIBUSI BARANG <i>Goods Distribution</i>	-	6.000,00	301,16	5,02%	0,00%
KEAGENAN KARGO <i>CARGO AGENCY</i>	1.428,62	1.800,00	1.351,22	75,07%	(5,42%)
KREDIT KPR MNC <i>MNC HOUSING LOANS CREDIT</i>	351,93	390,00	165,43	42,42%	(52,99%)
KREDIT MIKRO <i>MICRO CREDIT</i>	20.621,94	20.868,15	24.733,37	118,52%	19,94%
KREDIT MIKRO BAV <i>BAV MICRO CREDIT</i>	6.911,38	6.824,35	9.066,49	132,86%	31,18%
KREDIT MULTIGUNA <i>MULTIPURPOSE CREDIT</i>	5.096,06	6.840,78	8.977,16	131,23%	76,16%
KREDIT OTO <i>AUTOMOTIVE CREDIT</i>	22.540,62	88.372,71	74.044,88	83,79%	228,50%
KREDIT UMUM <i>COMMERCIAL CREDIT</i>	1.226,03	1.348,31	1.200,79	89,06%	(2,06%)
PAYMENT BOND	1.054,16	578,66	9.099,49	1,572,52%	763,20%
PEMBIAYAAN INVOICE <i>INVOICE FINANCING</i>	116,56	156,22	226,88	145,23%	94,65%
SUPERMIKRO <i>SUPERMICRO</i>	14.122,57	5.135,72	45.741,58	890,65%	223,89%
SURETYBOND	42.229,10	45.715,52	40.652,00	88,92%	(3,73%)
KREDIT KONTRA BANK GARANSI <i>COUNTER BANK GUARANTEE CREDIT</i>	61.348,90	84.964,54	61.474,72	72,35%	0,21%
TOTAL	177.846,19	270.994,23	277.950,02	102,57%	56,29%

Prospek Segmen Penjaminan Non-Program

Perum Jamkrindo melihat bahwa industri keuangan di Indonesia tidak hanya lembaga perbankan, lembaga keuangan *non-bank* seperti *multifinance*, *fintech*, koperasi, pegadaian, LPEI, ataupun pabrikan untuk distribusi barang juga membutuhkan penjaminan sebagai mitigasi risiko dan jumlahnya pun cukup banyak.

Di tahun 2017 saja pertumbuhan *multifinance* sebesar 7-8% tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai angka 8-10%. APBN & APBD untuk alokasi pengadaan barang dan jasa juga mencapai Rp1.000 triliun. Begitu juga dengan Volume Penjaminan Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non-Bank di tahun 2017 yang mencapai Rp27,44 triliun Rupiah atau 20,27% dari keseluruhan penjaminan pada Perum Jamkrindo yang sebesar Rp135,36 triliun. Dari data tersebut terlihat bahwa pasar penjaminan *suretyship* dan *non-bank* ini potensial dan masih terbuka luas.

Non-program Guarantee Segment Outlook

Perum Jamkrindo sees that the financial industry in Indonesia is not only banking institutions, non-bank financial institutions such as multi finance, fintech, cooperatives, pawnshops, LPEI, or manufacturers for the distribution of goods also need guarantee as a risk mitigation and there are quite a lot of them.

In 2017 alone the growth of multi finance of 7-8 % was not that much different from the banking credit growth which reached 8-10 %. The State and Regional Government Budgeting (APBN and APBD) for the allocation of procurement of goods and services reached IDR1,000 trillion. The Volume of Guarantee of Suretyship and Non-Bank Guarantee Division in 2017 reached IDR27.44 trillion or equal to 20.27% of the total acquired guarantee of Perum Jamkrindo of IDR135,36 trillion. From the data, it can be seen that the suretyship and non-bank guarantee market is very potential and still open for exploration.



PENJAMINAN SYARIAH

Penjaminan Syariah menasar segmen penjaminan untuk UMKM-K lebih khusus penjaminan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumtif, ketiga skema pembiayaan tersebut masih merupakan segmen favorit perbankan syariah, mengingat pemerintah sangat konsen dengan pengembangan infrastruktur dan perumahan rakyat.

Jamkrindo memiliki sejumlah produk di segmen penjaminan syariah, antara lain:

1. Penjaminan Pembiayaan Umum
2. Penjaminan Pembiayaan Mikro
3. Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa
4. Penjaminan Kontra Bank Garansi
5. Penjaminan Pembiayaan Multiguna
6. Penjaminan Pembiayaan FLPP

SYARIAH GUARANTEE

Syariah Guarantee is targeting the guarantee segment for SMEs, or more specifically, the guarantee of working capital, investment, and consumptive financing. The three financing schemes are still the favorite segments of Syariah banking, as the government is very much concerned with the development of infrastructure and public housing.

Jamkrindo has a number of products in the Syariah guarantee segment, such as:

1. General Financing Guarantee
2. Micro Financing Guarantee
3. Guarantee of Working Capital Financing of Construction & Procurement of Goods/Services
4. Counter Bank Guarantee
5. Multipurpose Financing Guarantee
6. FLPP Financing Guarantee



Kinerja Keuangan

FINANCIAL REVIEW

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik: Hertanto, Grace & Karunawan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Bahasan kinerja keuangan Perseroan, disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik: Hertanto, Grace & Karunawan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Bahasan kinerja keuangan Perseroan disampaikan dengan memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasi dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

This financial performance description is prepared based on the Company's Financial Statements presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2017. These financial statements have been audited by Public Accounting Firm: Hertanto, Grace & Karunawan with a fair opinion of all things material.

Discussion of the Company's financial performance is submitted with due consideration to the Consolidated Financial Statements of external auditors as an integral part of this Annual Report.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

This financial performance description is prepared in accordance with the Company's Financial Statements presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) generally accepted in Indonesia for the year ended December 31, 2017. These Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm: Hertanto, Grace & Karunawan with a fair opinion of all things material.

Discussion of the Company's financial performance is submitted with due consideration to the Consolidated Financial Statements of external auditors as an integral part of this Annual Report.

Jumlah Aset

dalam jutaan Rupiah

Total Assets

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalent</i>	5.418.223	5.723.816	(305.593)	(5,34%)
Surat Berharga <i>Securities</i>	4.025.861	3.209.124	816.737	25,45%
Piutang IJP <i>IJP Receivables</i>	2.474.754	2.347.025	127.729	5,44%
Piutang Penjaminan Ulang <i>Re-guarantee Receivables</i>	120.532	112.346	8.186	7,29%
Piutang yang diberikan <i>Loans</i>	776	955	(179)	(18,76%)
Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>	87.892	81.728	6.164	7,54%
Pajak Bayar dimuka <i>Prepaid Taxes</i>	-	82	(82)	(100,00%)
Premi dan Fee dibayar di muka <i>Prepaid Premiums and Fee</i>	1.132.300	991.153	141.147	14,24%



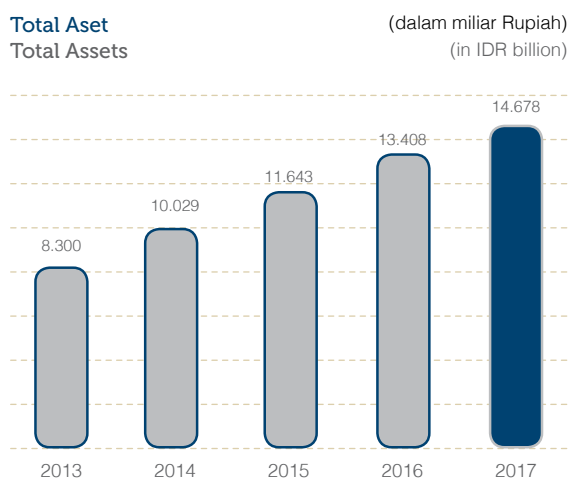
dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Beban dibayar di muka Prepaid Expenses	21.690	25.020	(3.330)	(13,31%)
Aset Tetap Fixed Assets	471.169	441.995	29.174	6,60%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	177.252	174.614	2.638	1,51%
Aset Lain-lain Other Assets	747.693	300.641	447.052	148,70%
Jumlah Aset Total Assets	14.678.143	13.408.418	1.269.725	9,47%

Total Aset Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.678 miliar, naik sebesar 9% atau Rp1.270 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp13.408 miliar. Total Aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir seperti tergambar dalam bagan di bawah ini:

Total Assets of Perum Jamkrindo as of December 31, 2017, amounted to IDR14,678 billion, an increase of 9% or IDR1,270 billion compared to the previous year which amounted to IDR13,408 billion. Total Assets have increased year by year over the last 5 years as illustrated in the chart below:



Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas Jamkrindo mengalami penurunan sebesar 5% atau Rp306 miliar dari Rp5.724 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp5.418 miliar pada tahun 2017. Penurunan yang terjadi dikarenakan kas dan setara kas dialokasikan untuk investasi dalam surat berharga.

Cash and Cash Equivalent

Cash and Cash Equivalents of PT Jamkrindo decreased by 5% or equivalent to IDR306 billion from IDR5,724 billion in 2016 to IDR5,418 billion in 2017. The decrease was caused by the allocation of cash and cash equivalents for investments in marketable securities.

Surat Berharga

Surat Berharga Perum Jamkrindo pada tahun 2017 sebesar Rp4.026 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp817 miliar atau 25% dibandingkan tahun sebelumnya Rp3.209 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan meningkatnya penempatan investasi.

Securities

Securities of Perum Jamkrindo in 2017 amounting to IDR4,026 billion, or increased by IDR817 billion or 25% compared to the previous year of IDR3,209 billion. The increase is due to increased investment placement.



Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP)

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Perusahaan pada tahun 2017 sebesar Rp2.475 miliar menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp128 miliar atau 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.347 miliar. Peningkatan yang terjadi disebabkan oleh meningkatnya volume penjaminan KUR.

IJP Receivables

The Company's IJP Receivables in 2017 of IDR2,475 billion represents an increase of IDR128 billion or 5% compared to the previous year which amounted to IDR2,347 billion. The increase is due to the increased volume of KUR guarantee.

Premi dan Fee Dibayar Dimuka

Premi dan *fee* dibayar dimuka Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp141 miliar atau 14,24% dari nilai sebesar Rp991 miliar di tahun 2016 menjadi Rp1,1 triliun di tahun 2017. Penyebab peningkatan ini lebih disebabkan karena volume penjaminan eksisting meningkat sehingga berpengaruh langsung terhadap peningkatan premi dan *fee* dibayar dimuka (*co guarantee* dan reasuransi).

Prepaid Premiums and Fee

Prepaid premiums and fees of the Company increased by IDR141 billion or 14.24% from IDR991 billion in 2016 to IDR1.1 trillion in 2017. The cause of this increase was the increased volume of existing guarantee, which directly affected the increase in premiums and prepaid fees (co-guarantee and reinsurance).

Aset Tetap

Aset Tetap Perusahaan pada penghujung tahun 2017 adalah sebesar Rp471 miliar dimana angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp29 miliar atau 7% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp442 miliar. Penyebab meningkatnya aset tetap Perusahaan ini adalah karena adanya peningkatan belanja modal.

Fixed Assets

The Company's fixed assets at the end of 2017 amounted to IDR471 billion, which represents an increase of IDR29 billion or 7% when compared to the previous year which amounted to IDR442 billion. The cause of the increase was an increase in capital expenditures.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan Perusahaan pada posisi 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp177 miliar, dimana terdapat pertumbuhan sebesar 2% atau Rp3 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp174 miliar. Pertumbuhan nilai ini dikarenakan adanya kenaikan cadangan-cadangan.

Deferred Tax Assets

The Company's Deferred Tax Assets as of December 31, 2017, amounted to IDR177 billion, representing a growth of 2% or IDR3 billion compared to the position of 31 December 2016 amounting to IDR174 billion. The growth of this value is due to the increase of reserves.

Aset Lain-lain

Aset lain-lain Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp748 miliar, mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp447 miliar atau 149% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp301 miliar. Peningkatan ini dikarenakan oleh penambahan deposito yang dibatasi penggunaannya dan subrogasi belum teridentifikasi.

Other Assets

The other assets of Perum Jamkrindo at end of 2017 amounted to IDR748 billion, a significant increase of IDR447 billion or 149% when compared to 2016 of IDR301 billion. This increase is due to the addition of restricted deposits and unidentified subrogation.

Aset Lain-lain

dalam jutaan Rupiah

Other Assets

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Deposito yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Deposit	424.140	76.140	348.000	457,05%
Piutang Dalam Proses Receivable in Process	170.435	78.489	(21.511)	85,36%



dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Klaim Dalam Proses Claim in Process	143.507	117.472	26.035	22,16%
Aset Lainnya Other Assets	9.443	14.930	(5.487)	(36,75%)
Aset Tak Berwujud-Software Intangible Asset - Software	168	153	15	9,80%
Jumlah Aset Lain-Lain Total Other Assets	747.693	300.641	447.052	148,70%

Total Liabilitas**Total Liabilities**

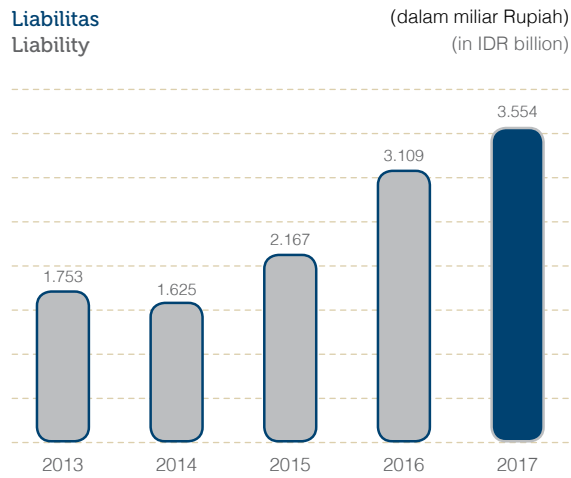
dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Utang Klaim Claim Payable	75.925	11.650	64.275	551,74%
Utang Pajak Tax Payable	59.550	72.812	(13.262)	(18,21%)
Cadangan Klaim Claims Reserve	427.143	404.959	22.184	5,48%
Utang Penjaminan Ulang Co-Guarantee Payable	109.687	66.604	43.083	64,69%
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	2.638.598	2.346.246	292.353	12,46%
Utang lain-lain Other Payable	204.458	178.409	26.049	14,60%
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	38.907	28.168	10.739	38,12%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.554.268	3.108.849	445.419	14,33%

Jumlah Liabilitas Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.554 miliar mengalami pertumbuhan sebesar Rp445 miliar atau 14,33% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp3.109 miliar. Pertumbuhan yang terjadi adalah dikarenakan hampir semua aspek pada liabilitas mengalami peningkatan karena terkait pertumbuhan usaha. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan selalu terjadi untuk Liabilitas setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir seperti dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:

Total Liabilities of Perum Jamkrindo as of December 31, 2017, amounted to IDR3,554 billion, which is an increase of IDR445 billion or 14.33% compared to 2016 of IDR3,109 billion. The reason for the growth is because almost all aspects of liability increased due to the growth of business. It can be said that there is always a growth in Liabilities every year for the last 5 years as can be seen in the chart below:



Utang Klaim

Utang Klaim Perusahaan pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp76 miliar mengalami peningkatan sebesar Rp64 miliar atau 552% dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp12 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan klaim pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan untuk persetujuan di akhir tahun 2017 baru dibayarkan di awal tahun 2018.

Claim Payable

The Company's Claim Payable at the end of 2017 amounted to IDR76 billion or an increase of IDR64 billion or 552% when compared to IDR12 billion in 2016. The increase is due to increased claims in 2017, and the approval by the end of 2017 is only paid in early 2018.

Utang Penjaminan Ulang

Utang Penjaminan Ulang Perum Jamkrindo pada tahun 2017 adalah sebesar Rp110 miliar yang mengalami peningkatan sebesar Rp43 miliar atau 65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Rp67 miliar. Peningkatan ini dikarenakan peningkatan volume penjaminan yang berhubungan langsung dengan premi yang harus dibayar perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

Co-Guarantee Payable

The Co-Guarantee Payable of Perum Jamkrindo in 2017 amounted to IDR110 billion, which is an increase of IDR43 billion or 65% compared to the previous year of IDR67 billion. This increase is due to an increase in the volume of guarantee which is directly related to the premium the company pays to transfer the risk of claims.

Cadangan Klaim

Cadangan Klaim Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp427 miliar, naik sebesar 5% atau Rp22 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp404 miliar. Kenaikan cadangan klaim ini terjadi dikarenakan meningkatnya volume penjaminan sehingga perusahaan membentuk cadangan klaim yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya untuk memitigasi risiko.

Claims Reserve

Jamkrindo's Claims Reserve at the end of 2017 amounted to IDR427 billion, or an increase of 5% or IDR22 billion when compared to the previous year of IDR404 billion. The increase in Claims Reserve is due to an increase in the volume of guarantee so that the company had to form a claims reserve which is higher than the previous year's to mitigate risks.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perusahaan meningkat sebesar 38% atau Rp 11 miliar, posisi di tahun 2016 sebesar Rp28 miliar dan posisi di akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp39 miliar. Peningkatan yang terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah SDM di perusahaan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan imbalan pasca kerja.

Employee Benefits Liabilities

The Company's Employee Benefits Liabilities increased by 38% or equal to IDR11 billion. Its position in 2016 amounted to IDR28 billion and its position in the year ending of 2017 was IDR39 billion. The increase is due to the increase in the number of human resources in the company which affects the increase in post-employment benefits.



Ekuitas

Equity

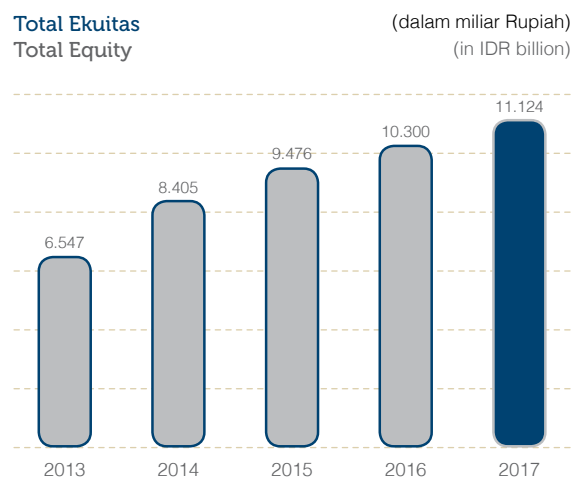
dalam jutaan Rupiah

in IDR million

Uraian Description	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)		Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
	Nominal	%	Nominal	%
Penyertaan Modal Pemerintah State Equity Participation	7.638.733	7.638.733	(0)	0,00%
Cadangan-cadangan Reserves	2.471.937	1.828.847	643.090	35,16%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Component	211.345	139.930	71.415	51,04%
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interest	14	13	1	5,16%
Saldo Laba Retained Earnings	801.845	692.045	109.800	15,87%
Jumlah Ekuitas Total Equity	11.123.875	10.299.569	824.306	8,00%

Posisi Ekuitas Perum Jamkrindo pada tahun 2017 adalah sebesar Rp11.124 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp842 miliar atau 8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp10.300 miliar. Jumlah Ekuitas Perum Jamkrindo selama 5 tahun berakhir selalu mengalami peningkatan, dapat terlihat dari bagan berikut ini:

The equity position of Perum Jamkrindo in 2017 amounted to IDR11,124 billion. This is an increase of IDR842 billion or 8% when compared to the previous year of IDR10,300 billion. Total Equity of Perum Jamkrindo for the last 5 years has always increased, as can be seen from the following chart:





LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

COMPREHENSIVE PROFIT (LOSS) STATEMENTS

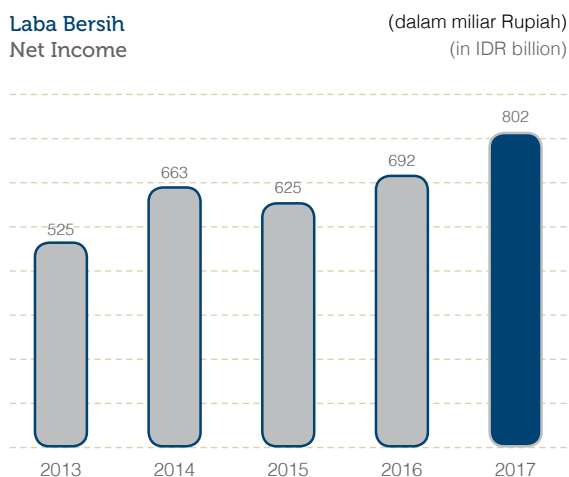
dalam jutaan rupiah

in IDR million

Uraian Description	2017	2016	Pertumbuhan (Penurunan) Growth (Decrease)	
			Nominal	%
Pendapatan Penjaminan <i>Guarantee Income</i>	1.805.686	1.588.441	217.245	13,68%
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	(1.004.610)	(871.583)	(133.027)	15,26%
Penjaminan Bersih <i>Operating Income - Net</i>	801.077	716.857	84.220	11,75%
Pendapatan Investasi Bersih <i>Investment Income - Net</i>	601.634	587.678	13.956	2,37%
Pendapatan Lain-lain Bersih <i>Other Income - Net</i>	328.679	294.070	34.609	11,77%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(708.169)	(657.151)	(51.018)	7,76%
Laba Sebelum Pajak <i>Income Before Tax</i>	1.023.221	941.454	81.767	8,69%
Laba Bersih <i>Net Income</i>	801.846	692.045	109.801	15,87%
Laba Komprehensif <i>Total Comprehensive Income</i>	859.677	573.335	286.342	49,94%

Laba Bersih Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp802 miliar dimana angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp110 miliar atau 16% dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp692 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan seiring peningkatan volume penjaminan dan investasi.

Net income of Perum Jamkrindo at the end of 2017 amounted to IDR802 billion, which represents an increase of IDR110 billion or 16% when compared to its position at the end of 2016 of IDR692 billion. This increase was attributed to the rising incomes as the volume of guarantee and investment increased.





Imbal Jasa Penjaminan Bersih

Penjaminan Bersih Perusahaan pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp801 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp84 miliar atau 12% dibandingkan dengan akhir tahun 2016 yaitu sebesar Rp717 miliar. Peningkatan nilai penjaminan bersih ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan IJP.

Pendapatan Investasi Bersih

Pendapatan Investasi Bersih Perusahaan per 3 Desember 2017 adalah sebesar Rp602 miliar, terdapat pertumbuhan sebesar Rp14 miliar atau 2% dibandingkan dengan akhir tahun 2016 yang sebesar Rp588 miliar. Pertumbuhan yang terjadi dikarenakan peningkatan dana kelolaan investasi sehingga pendapatan investasi mengalami peningkatan.

Pendapatan Lain-lain Bersih

Pendapatan Lain-lain Bersih Perum Jamkrindo pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp329 miliar, mengalami peningkatan sebesar 12% atau Rp35 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar Rp294 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan subrogasi.

Beban Usaha

Beban Usaha pada Perusahaan pada akhir tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8% atau Rp51 miliar yaitu senilai Rp708 miliar bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp657 miliar. Peningkatan beban usaha pada tahun ini lebih disebabkan karena bertambahnya jumlah SDM sehingga beban SDM mengalami peningkatan.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak Perum Jamkrindo per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.023 miliar dimana angka ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 9% atau Rp82 miliar dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp941 miliar. Peningkatan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan seiring peningkatan volume penjaminan dan investasi.

Net Guarantee Fee

The Company's net operating income at end of 2017 amounted to IDR801 billion which is an increase of IDR84 billion or 12% when compared to the end of 2016 of IDR717 billion. The increase in net operating income is due to the increase in IJP revenues.

Investment Income-Net

The Company's net investment income per December 3, 2017, was IDR602 billion, a growth of IDR14 billion or 2% when compared to the end of 2016 of IDR588 billion. The growth is due to the increase in investment-managed funds which caused the increase in net investment income.

Other Income-Net

Other Net Income of Perum Jamkrindo at the end of 2017 was IDR329 billion which is an increase of 12% or IDR35 billion when compared to the year 2016 other net income of IDR294 billion. This increase is more to the increase in subrogated income.

Operating Expenses

Operating Expenses of the Company at the end of 2017 increased by 8% or IDR51 billion, amounting to IDR708 billion when compared to the previous year of IDR657 billion. The increase in operating expenses this year is due to the increasing number of human resources so that the burden of human resources has increased.

Income Before Tax

Perum Jamkrindo's income before tax per December 31, 2017, amounted to IDR1,023 billion, which represents an increase of 9% or IDR82 billion when compared to December 31, 2016, of IDR941 billion. The increase was attributed to the rising income as the volume of guarantee and investment increased.

Laba Komprehensif

Laba Komprehensif Perusahaan pada akhir tahun 2016 adalah sebesar Rp573 miliar dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 50% atau Rp286 miliar menjadi Rp860 miliar. Terdapatnya peningkatan pada Laba Komprehensif pada tahun ini adalah dikarenakan oleh meningkatnya pendapatan seiring peningkatan volume penjaminan dan investasi, serta nilai pasar surat berharga yang naik.

Total Comprehensive Income

The Company's Total Comprehensive Income at the end of 2016 amounted to IDR573 billion and increased in 2017 by 50% or equal to IDR286 billion to IDR860 billion. The increase in the Comprehensive Income this year is due to an increase in income as the volume of guarantee and investment increases, as well as the rising market value of securities.

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statements

Arus Kas

Dalam jutaan Rupiah

Cash Flow

In IDR million

Uraian Description	Tahun Year		Pertumbuhan/Penurunan Growth/Decrease	
	2017	2016	Rp IDR	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi <i>Cash Flow from Operational Activity</i>	350.601	(212.440)	563.041	(265,0%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi <i>Cash Flow from Investment Activity</i>	(608.193)	154.112	(762.305)	(494,6%)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan <i>Cash Flow from Financing Activity</i>	(48.000)	187.323	(235.323)	(125,6%)
(Penurunan) Kenaikan Kas dan Setara Kas <i>(Decrease) Increase of Cash and Cash Equivalent</i>	(305.593)	128.994	(434.587)	(336,9%)
Kas dan setara kas awal tahun <i>Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year</i>	5.723.816	5.594.822	128.994	2,3%
Kas dan setara kas akhir tahun <i>Cash and Cash Equivalent at the end of the year</i>	5.418.223	5.723.816	(305.593)	(5,3%)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp351 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp563 miliar atau 265% dimana pada tahun 2016 sebesar Rp212 miliar. Arus kas masuk diperoleh dari penerimaan imbalan jasa penjaminan dan penerimaan aktivitas operasi lainnya.

Cash Flow from Operational Activity

Net cash flows generated from operating activities in 2017 amounted to IDR351 billion, which is an increase of IDR563 billion or 265% when compared to 2016 of IDR212 billion. The cash inflows are derived from the guarantee fee and other operating activities.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp608 miliar, mengalami penurunan sebesar 494% atau Rp762 miliar dimana pada tahun 2016 Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp154 miliar.

Cash Flow from Investment Activity

Net cash flows used in investing activities in 2017 amounted to IDR608 billion, a decrease of 494% or IDR762 billion when compared to the one in 2016 when the Company obtained net cash flows from investment activities of IDR154 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp48 miliar, mengalami penurunan sebesar 126% atau Rp235 miliar dimana pada tahun sebelumnya Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp187 miliar.

Cash Flow from Financing Activity

Net cash flow used in financing activities in 2017 amounted to IDR48 billion, a decrease of 126% or IDR235 billion, which in the previous year, the Company obtained net cash flow from financing activities amounting to IDR187 billion.



TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Jaminan. Dari perhitungan tingkat kesehatan Perusahaan. Sesuai dengan evaluasi tingkat kesehatan BUMN didasarkan pada Surat Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri Negara BUMN RI PER-10/MBU/2014 tanggal 19 Agustus 2011 disertai dengan Surat Menteri Negara BUMN No. S-314/MBU.4/2011 tanggal 13 Oktober 2011. dan Surat Menteri Negara BUMN terbaru No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, maka tingkat kesehatan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia pada tahun 2017 adalah dengan skor 81.50 berada pada kategori "SEHAT AA", sementara pada tahun sebelumnya mendapatkan skor 78,50 Perusahaan masuk dalam kategori "SEHAT A".

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Penjaminan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Prospek penjaminan FLPP masih terbuka mengingat masih ada mitra bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerjasama dengan Perum Jamkrindo. Dengan adanya potensi tersebut, maka Perum Jamkrindo akan melakukan pendekatan dengan bank penyalur FLPP yang belum menjalin kerjasama agar di tahun depan perjanjian kerjasama dapat ditandatangani dan produksi penjaminan KUR diharapkan dapat meningkat.

Untuk target penyaluran FLPP di tahun mendatang, diharapkan dapat mengalami peningkatan sebesar 12,5% dari target tahun 2017 sebesar Rp12 triliun menjadi Rp14 triliun.

Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Dari target penyaluran KUR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Perum Jamkrindo menargetkan volume penjaminan sebesar 50% dari target tersebut.

Untuk target penyaluran KUR di tahun mendatang, diharapkan dapat mengalami peningkatan dari Rp50 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp60 triliun di tahun 2018. Dikarenakan target KUR oleh Pemerintah kepada penyalur KUR meningkat sebesar 9% dari target tahun 2017 sebesar Rp110 triliun menjadi Rp120 triliun.

COMPANY HEALTH INDEX

Evaluation of the Company's Health Index is based on the Decree of State Minister of SOE number: KEP-100/MBU/2002 on Evaluation of Health Index, and Regulation of State Minister of SOE of the Republic of Indonesia number: PER-04/MBU/2011 dated August 19, 2011 on the Evaluation Indicators for Health Index of State-Owned Enterprises of Financial Services in the Insurance and Guarantee Services Business. In accordance with the evaluation of the soundness of state-owned enterprises, based on the Decree of the Minister of SOE No. RI. KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia PER-10/MBU/2014 dated August 19, 2011, accompanied by Letter of the Minister of State Owned Enterprises No. S-314/MBU.4/2011 dated October 13, 2011. and Letter of State Minister of State Owned Enterprises no. PER-10 / MBU / 2014 dated July 25, 2014, Then the level Corporate health level of Perum Jamkrindo in 2017 is 81.50 which fall into the category "HEALTHY AA ", while in the previous year the Company received a score of 78,50 which made the Company scores qualified for "HEALTHY A" category.

COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS

Guarantee of Housing Financing Liquidity Facility

The prospect of FLPP guarantee is still open since there are still partners of FLPP distributing banks which have not yet established a cooperation with Perum Jamkrindo. With this potential, Perum Jamkrindo will approach the FLPP distributing banks which have not established a cooperation so that next year the cooperation agreement can be signed and the production of KUR guarantee is expected to increase.

The target of FLPP distribution in the coming year is expected to increase by 12.5% from 2017 target of IDR12 trillion to IDR14 trillion.

Guarantee on Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Of the targeted KUR distribution target set by the government, Perum Jamkrindo targets a guarantee volume of 50% of the target.

KUR target in the coming year is expected to increase from IDR50 trillion in 2017 to IDR60 trillion in 2018. This is due to the increase in KUR target set by the Government to the KUR dealer by 9% from the target of 2017 of IDR110 trillion to IDR120 trillion.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN

Perum Jamkrindo sebagai salah satu entitas usaha sangat menjunjung tinggi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan sebagai upaya mengatur hubungan antar organ dalam entitas usaha; baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada perundang-undangan dan etika berusaha.

Perum Jamkrindo senantiasa memiliki semangat dan komitmen dalam menerapkan GCG di lingkup Perusahaan yang dilandaskan pada kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar Perum Jamkrindo dapat berkembang secara maksimal serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi dinamika usaha khususnya pada industri penjaminan secara konsisten. Untuk itu, implementasi GCG menjadi aspek penting bagi Perusahaan dalam mencapai cita-cita yang digariskan serta mewujudkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam mengimplementasikan GCG, Perum Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi; mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan pemilik modal dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

COMMITMENT ON SUSTAINABLE GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Perum Jamkrindo as one of the business entities highly upholds Good Corporate Governance. Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism created as an effort to regulate the relationships between organs within a business entity; both internal and external relationships which are based on legislation and business ethics.

Perum Jamkrindo always has the spirit and commitment for implementing GCG in the Company based on compliance with prevailing laws and regulations. It is intended so that Perum Jamkrindo can develop optimally and have a high competitiveness in facing the dynamics of the business, especially and consistently, in the guarantee business. Therefore, the implementation of GCG becomes an important aspect for the Company in achieving the goals outlined and realizing sound corporate principles.

In implementing GCG, Perum Jamkrindo refers to several laws and regulations, particularly Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE). This Law gives overall foundation to the organizational management aspect; from shareholders rights and obligations, duties and authorities of Directors and Board of Commissioners/Board of Supervisors, to relationship between the Company and internal and external stakeholders.

As an SOE entity, GCG implementation in the Company scope also refers to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 on Implementation of Good Corporate Governance on State-Owned Enterprises (SOE) as amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012, stating that GCG are principles underlying a process and mechanism of managing a company based on laws and regulations and business ethics. Implementation of GCG principles covers transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, which are strong basis to the sustainability of the Company's business activity. Furthermore, GCG implementation that refers to best practices will increase trust from the equity owners and stakeholders, which will bring the Company to sustainable and significant advancement.



Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut, penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

In accordance with the Regulation of the Minister of SOEs, the application of GCG principles to BUMN entities shall have the following objectives:

1. To optimize SOE value so that the company has strong competitiveness, nationally and internationally.
2. To support SOE management professionally, efficiently, and effectively, as well as to empower functions and increase the independence of the Company's organ.
3. To support the Company's organ in making decisions and taking actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOE social responsibility towards the stakeholders and the environmental preservation surrounding the SOE.
4. To increase SOE's contributions to the national economy.
5. To improve conducive climate for national investment development.

PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Responsibilitas <i>Responsibility</i>	Independensi <i>Independency</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
--	---	---	--	-------------------------------------

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemilik Modal, Dewan Pengawas maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No. 88/Kep-Dir/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

GCG implementation principle used by the Company refers to Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 and GCG General Guidelines from the National Committee of Governance Policies (KNKG) through GCG principles generally known as TARIF, which are transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness on all Corporate Organs either Equity Owners, Board of Supervisors or Directors stipulated in the Joint Decree of the Directors and Board of Supervisors of Perum Jamkrindo No. 88/KEP-DIR/XII/2012, KEP-05/DP JAMKRINDO/ XII/2012 dated 3 December 2012 on Guidelines for Good Corporate Governance Implementation of Public Corporation (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia (Credit Guarantee Indonesia), with details as follows:



Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance principles</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independency</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
Pemilik Modal Equity Owner	<p>a. Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain <i>merger</i>, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansional</p> <p>b. Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas</p>	<p>Pemilik modal mempunyai tanggungjawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan</p>	<p>Pemilik modal tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Pengawas sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan</p>	<p>Pemilik modal berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Pengawas</p>
	<p>a. <i>Clear disclosure of extraordinary transaction plans includes mergers, acquisitions, and sale of Company assets in substantial quantities</i></p> <p>b. <i>Openness in determining the remuneration of the directors and board of supervisors</i></p>	<p><i>Equity owner has the responsibility to monitor the implementation of GCG principles in the Company's management process and ensure that all of the Company's management comply with the laws and regulations</i></p>	<p><i>Equity owner is not allowed to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Directors in accordance with the prevailing laws and regulations</i></p>	<p><i>Perform a common procedure in determining the members of the Directors and Board of Supervisors in order to objectively hire the right people according to the qualifications required by the Company</i></p>	<p><i>Equity owner is entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Directors and or Board of Supervisors</i></p>



Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance principles</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independency</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	<p>a. Dibuat risalah rapat Dewan Pengawas yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan</p> <p>b. Kehadiran setiap anggota Dewan Pengawas dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan</p> <p>c. Remunerasi Dewan Pengawas dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan</p> <p>a. <i>Minutes of the Board of Supervisors meeting indicate the dynamics of the meeting in decision making process</i></p> <p>b. <i>Attendance of each member of the Board of Supervisors and the implementation of the Board of Supervisors meeting are reported in the Company's Annual Report</i></p> <p>c. <i>Remuneration of the Board of Supervisors is reported in the Company's Annual Report</i></p>	<p>a. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif</p> <p>b. Pemberdayaan fungsi Dewan Pengawas</p> <p>a. <i>The Board of Supervisors is responsible for overseeing the implementation of the Company's strategy and requiring the implementation of accountability and providing advice to the Directors in the framework of effective management of the Company</i></p> <p>b. <i>Empowerment of Board of Supervisors functions</i></p>	<p>a. Dewan Pengawas harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya</p> <p>b. Dewan Pengawas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal</p> <p>c. Dewan Pengawas turut bertanggungjawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan Direksi kepada Pemilik Modal</p> <p>a. <i>Board of Supervisors shall have a commitment to comply with the laws and regulations relating to its official duties</i></p> <p>b. <i>Board of Supervisors is responsible for the performance of its duties to the Equity Owner</i></p> <p>c. <i>Board of Supervisors is also responsible for the actuality of the financial statements submitted by the Directors to the Equity Owners</i></p>	<p>a. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan</p> <p>b. Dewan Pengawas tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerjasama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin</p> <p>a. <i>Provide objective consideration in solving problems faced by the Company that may contain potential conflict of interest</i></p> <p>b. <i>Board of Supervisors is not authorized to make day-to-day management decisions of the Company such as decisions on employee appointments and dismissals or the signing of cooperation or contracts of a routine task</i></p>	<p>Dewan Pengawas dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan stakeholders</p> <p><i>The Board of Supervisors in carrying out its positions will always apply the Company's business ethics in order to meet the interests of stakeholders</i></p>



Organ GCG GCG Organs	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance principles</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independency</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
Direksi <i>Directors</i>	<p>a. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada stakeholder secara transparan</p> <p>b. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan diantaranya disajikan melalui website Perusahaan</p> <p>c. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan</p> <p>a. <i>Provide Company Activity and Financial Report as a supporting tool to transparently disclose financial transactions and Company performance to the stakeholders</i></p> <p>b. <i>Disclose information and Company Financial Statements are presented on the Company's website</i></p> <p>c. <i>Discloses salaries and other remuneration of the Directors in the Annual Report</i></p>	<p>a. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan stakeholder</p> <p>b. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan</p> <p>c. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen.</p> <p>d. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya</p> <p>a. <i>Directors should be able to put priority order in the effort of fulfilling the stakeholder's interest</i></p> <p>b. <i>The Directors establish and determine an effective Internal Control System to secure the Company's assets</i></p> <p>c. <i>The Directors empower the role and function of SPI as management's strategic partner</i></p> <p>d. <i>The Directors shall ensure that SPI has access to information about the Company which is required to perform its duties</i></p>	<p>a. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan</p> <p>b. Direksi bertanggungjawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan</p> <p>c. Direksi bertanggungjawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh stakeholder</p> <p>a. <i>The Directors shall have a commitment to comply with the laws and regulations relating to the Company's operations</i></p> <p>b. <i>The Directors are responsible for the material presented in the Financial Statements</i></p> <p>c. <i>The Directors are responsible for information disclosure of the Financial Statement on national publication media in order to be accessed by stakeholders</i></p>	<p>Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya</p> <p><i>The Directors composition shall enable the Directors to act independently in the sense that there is no interest which may interfere with the ability to perform the duties independently and critically in relation to each other</i></p>	<p>a. Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja</p> <p>b. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan <i>stakeholder</i></p> <p>a. <i>Applying adequate reward and punishment system so that every employee obtains a sense of fairness associated with the success in achieving performance</i></p> <p>b. <i>Applying the Company's business ethics in order to fulfill the stakeholders' interests</i></p>



Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 2003.
6. Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
7. Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
10. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
11. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
14. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

Legal Basis

GCG implementation in the Company's area refers to several laws and regulations applicable in Indonesia, among others:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (SOE).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2016 on Guarantee.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 on Changes of Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption.
4. Law of the Republic of Indonesia No. 28 of 1999 on Administering Clean Country that is Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
5. Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 2002 on Money Laundering as amended by Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003. 6.
6. Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 on Information Disclosure.
7. Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions.
8. Government Regulation No. 41 of 2008 on Public Corporate (Perum) Indonesia Credit Guarantee (Jaminan Kredit Indonesia)
9. Government Regulation No. 38 of 2008 on Changes of Government Regulation No. 6 of 2006 on the Management of State/Regional-Owned Property
10. Government Regulation No. 45 of 2005 on Establishment, Management, Monitoring, and Dissolution of SOE.
11. Regulation of Minister of SOE No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 and its changes No. PER-09/MBU/2012 on the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State Owned Enterprises.
12. Regulation of Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines to Determine Remuneration of the Directors, Board of Commissioners, and Board of Supervisors of State-Owned Enterprise.
13. Regulation of Minister of SOE No. PER-02/MBU/2013 dated 18 February 2013 on Guidelines to Prepare SOE Information Technology Management.
14. Regulation of Minister of SOE No. PER-05/MBU/2006 on Audit Committee for SOE.



- 15. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN.
- 16. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

- 15. Decree of Secretary of SOE State Minister No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation in SOE.
- 16. General Guidelines of GCG Indonesia by the National Committee of Governance Policies (KNKG).

Roadmap Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik

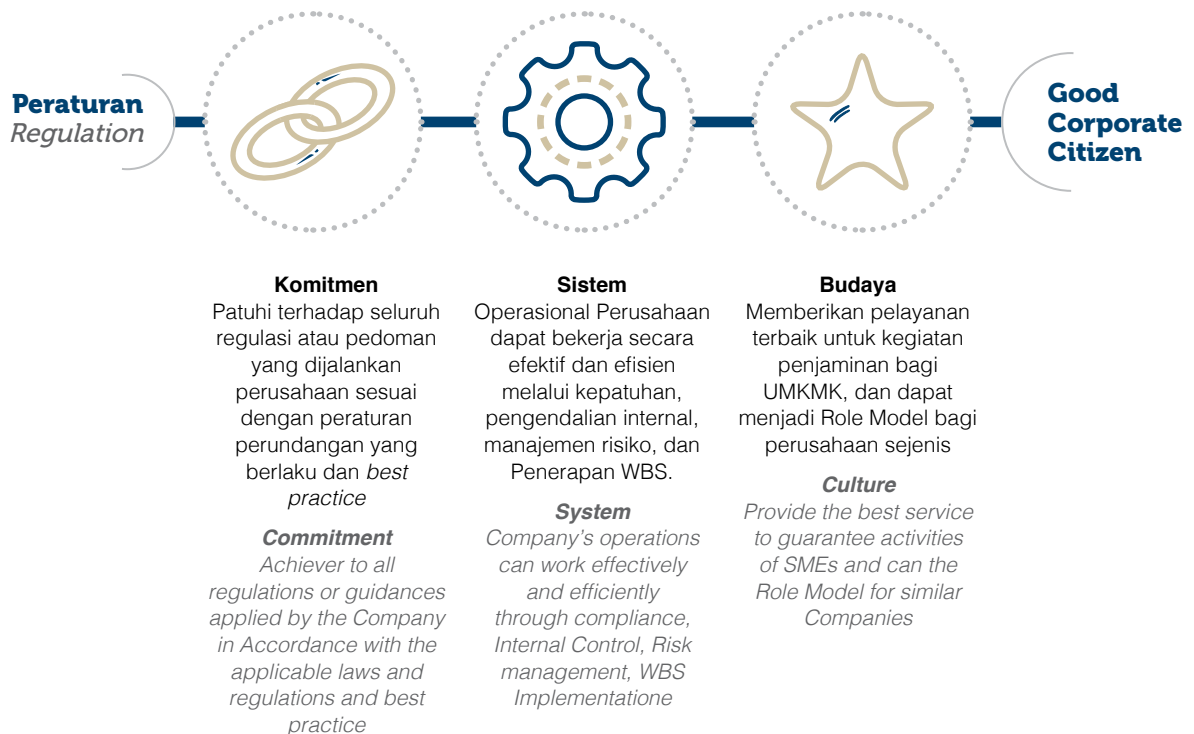
Roadmap of Good Corporate Governance

Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

GCG process is a way or mechanism done by the company and management in implementing GCG principles in order to perform its functions and duties in accordance with the applicable laws and regulations. The manifestation of commitment, GCG structure, system and procedures which have been developed by the Company aims to create added value for the stakeholders through professional management of the company, effectively and efficiently.

Perum Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

Perum Jamkrindo has a Roadmap in implementing GCG principles in order to achieve Good Corporate Citizen with the following mechanisms:





Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Perum Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Perum Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Perum Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Perum Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Budaya

Nilai-nilai budaya Perum Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Perum Jamkrindo, maka seluruh Insan Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Perum Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta benchmark bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Commitment

In implementing GCG principles, all of the Company's Persons are committed to adhere and comply with all applicable laws and regulations, as well as the generally accepted ones. Support from the management provides a major role in determining the direction and objectives of GCG implementation in Perum Jamkrindo. In practice, Perum Jamkrindo Management serves as an example for the employees to keep committing to the ongoing GCG implementation. Perum Jamkrindo will apply GCG principles in every business process and make improvements of the GCG support tools.

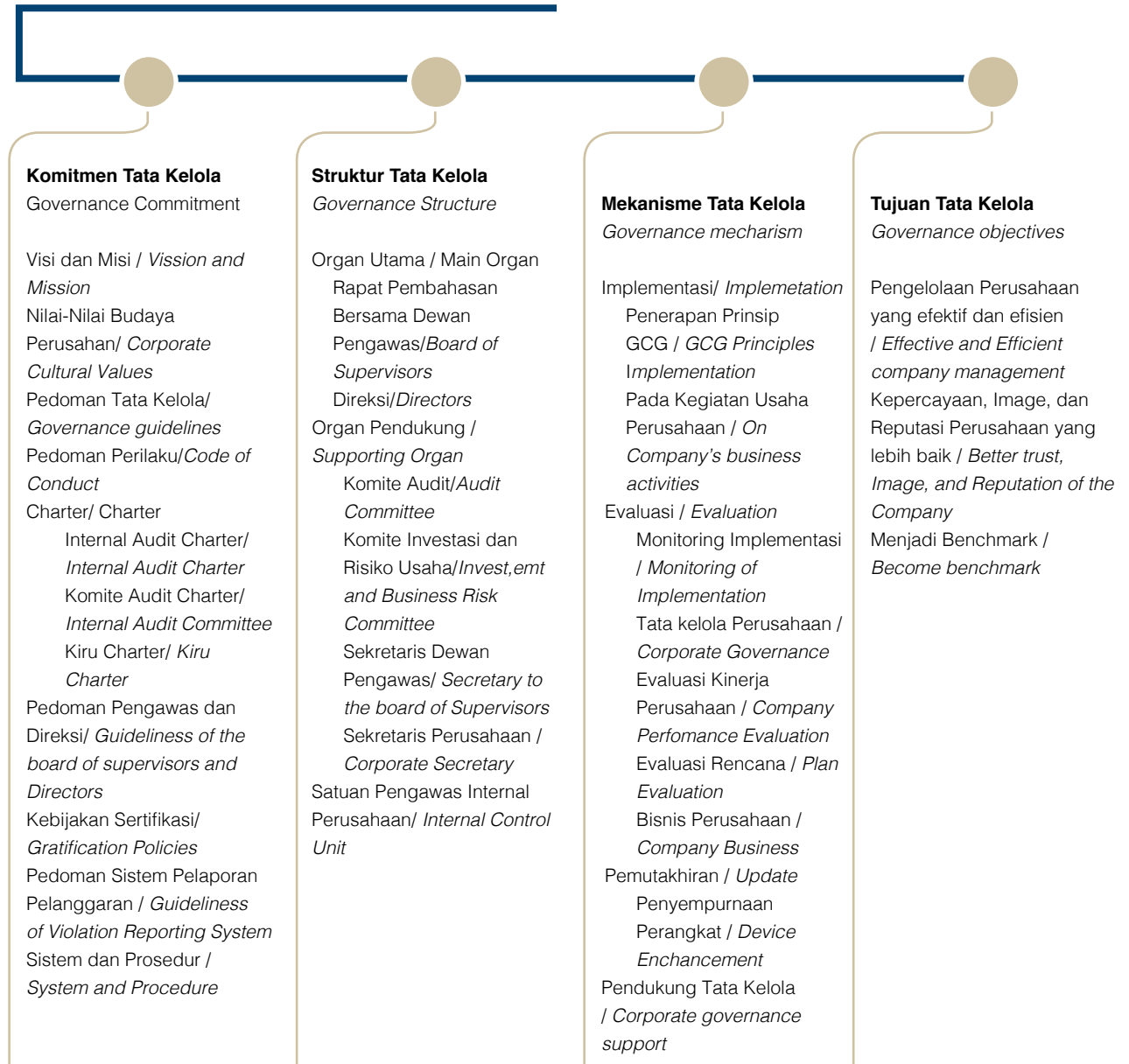
System

In supporting sustainable GCG commitment at Perum Jamkrindo, it is necessary to have an operational system that can work effectively and efficiently through compliance with the applicable laws and regulations, an adequate internal control system and proper risk management, and effective implementation of violation reporting system.

Culture

The cultural values of Perum Jamkrindo are the foundation for the Company's employees in working to be clearer and more structured. In order to implement GCG at Perum Jamkrindo, all of the Company's employees are committed to implement corporate culture values that are in line with the GCG principles.

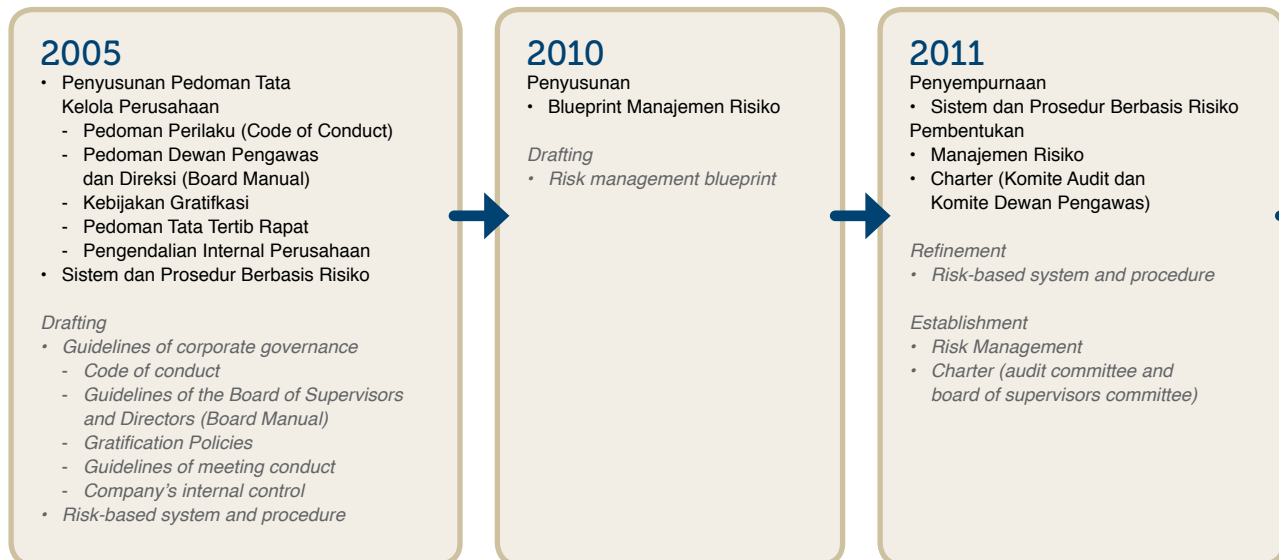
The objective of GCG implementation performed by Perum Jamkrindo is to become a Guarantee Company which provides value to the stakeholders through effective and efficient Company management by creating cultural values so as to increase the level of trust, establish a good Corporate image and reputation, as well as benchmarks for other similar companies as described below:

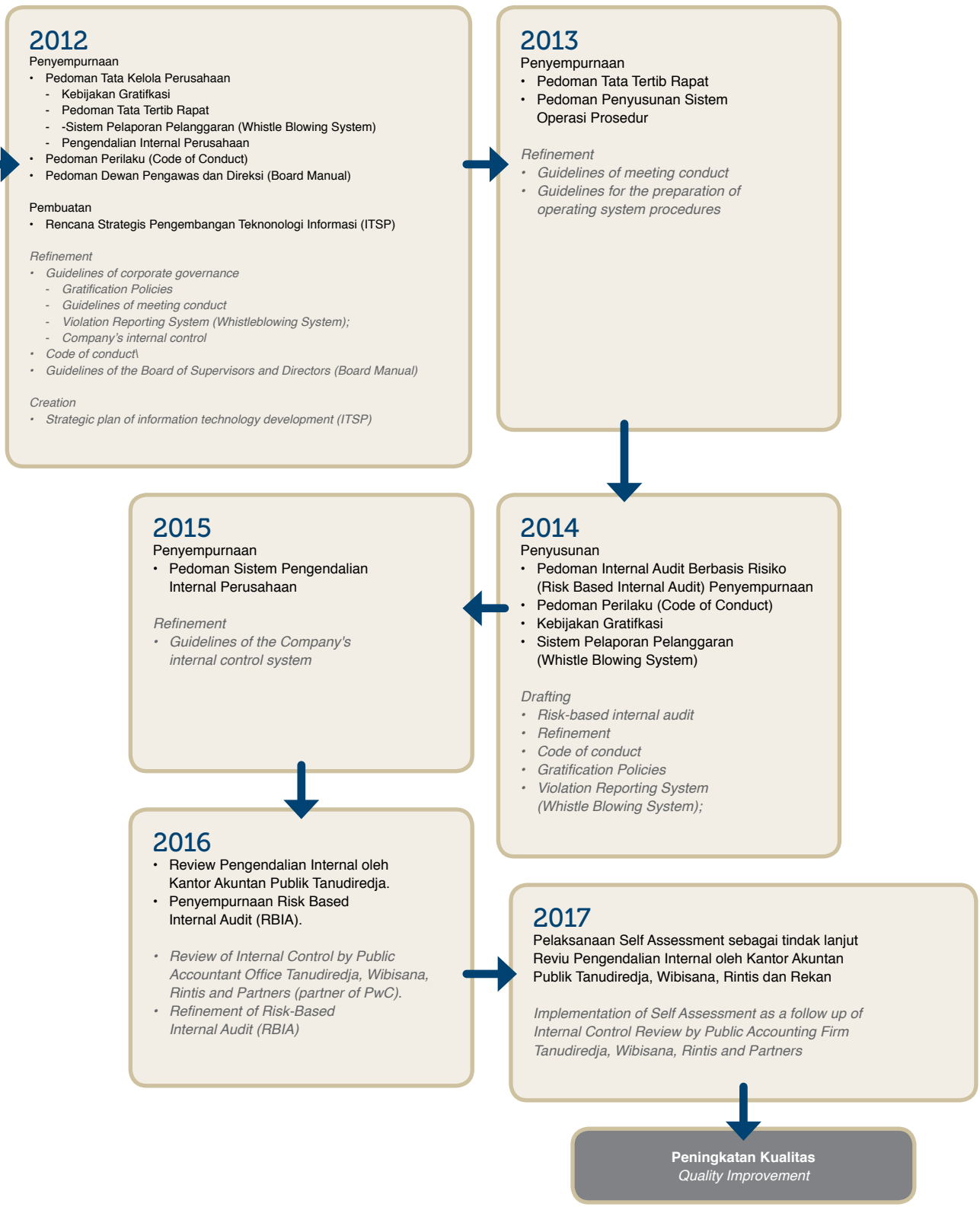




Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik

Track record of Good Corporate Governance development







PENILAIAN: EVALUASI, PEMANTAUAN, DAN PENINGKATAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Assessment Penerapan GCG

Metode Assessment

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Perum Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuan pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perum Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Perum Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Perum Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Perum Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk *trend* kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Perum Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Perum Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

ASSESSMENT: EVALUATION, MONITORING, AND IMPROVEMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE APPLICATION

ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

Assessment Method

As a form of commitment to the implementation of GCG principles, Perum Jamkrindo conducts assessment or appraisal of GCG implementation in the Company's environment. Assessment is done in 2 (two) models, which are through self assessment or evaluation conducted by the Company's internal team, and assessment conducted by an independent party. The purposes of conducting assessment on GCG implementation in Perum Jamkrindo refers to the Letter of the Secretary of Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012, which are as follows:

1. Measuring the quality of the company's GCG implementation through evaluation of GCG criteria fulfillment level with the real condition applied by Perum Jamkrindo, through scoring/ valuing GCG implementation and its application quality category.
2. Identifying the strengths and weaknesses of the company's GCG implementation, and proposing improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and the application in Perum Jamkrindo.
3. Monitoring the consistency of GCG implementation at Perum Jamkrindo and obtaining inputs for improvement and development of corporate governance policies within the company's environment.

The assessment results are expected to be the basis for improvement and refinement of the implementation of GCG practices in Perum Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practice is also expected to provide benefits to encourage the Company's management in a transparent, professional, and efficient manner so as to increase the Company's value in the form of the company's high performance trends, good Corporate image, and trust from the stakeholders (services users, employees, and society as a whole) towards Perum Jamkrindo

The basis for the assessment/evaluation of GCG implementation in Perum Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance at State-Owned Enterprises (SOE) as amended by Minister of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012 and Letter of the Secretary

Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 on Indicator/Parameter of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation at State-Owned Enterprises.

Assessment Tahun 2016 dan Tindak Lanjutnya di Tahun 2017

Assessment in 2016 and its Follow-up in 2017

Penilaian dilakukan pada tahun buku 2016 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 65/SPK/4.2/XI/2016 tanggal 1 November 2016.

Assessment is conducted in the fiscal year 2016 with the objective of providing recommendations on continuous improvement of the Company's GCG implementation. The assessment process is conducted based on the Work Order Letter No. 65/SPK/4.2/XI/2016 dated November 1, 2016.

Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i>	: Assessment/Penilaian <i>Assessment</i>
Penilai <i>Assessor</i>	: Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali <i>Public Accounting Firm of Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang, and Ali</i>
Metode Penilaian <i>Assessment Method</i>	: Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 <i>Assessment Indicator/Parameter of GCG Implementation SK16/S.MBU/2012</i>
Tahun Buku Penerapan <i>Implementation Year</i>	: 1 Januari - 31 Desember 2016 <i>January 1 - December 31, 2016</i>
Periode Pengukuran <i>Assessment Period</i>	: 7 November 2016 - 3 Januari 2017 <i>November 7, 2016 - January 3, 2017</i>

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamkrindo tahun 2016 mencapai total skor sebesar 92,120 dengan kualifikasi SANGAT BAIK, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The assessment result of Perum Jamkrindo GCG assessment in 2016 achieved a total score of 92.120 with "Very Good" qualification, which can be seen in the following table.

	Aspek <i>Aspect</i>	Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Amount</i>	Pencapaian <i>(%)</i> Achievement <i>(%)</i>
	1	2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i>	7.000	6.962	99,456
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal <i>Shareholders and RPB/Equity Owners</i>	9.000	8.206	91,180
III	Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	35.000	32.249	92,139
IV	Direksi <i>Directors</i>	35.000	32.943	94,124
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9.000	7.760	86,225
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5.000	4.000	80,000
	Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>	100.000	92.120	92,120
	Peringkat Kualitas Penerapan Gcg <i>Rank of the GCG Implementation Quality</i>	"Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>		

**Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment****Classification of Assessment Implementation Quality**

Nilai di atas 85 <i>Score above 85</i>	:	Sangat Baik <i>Very Good</i>
75 < Nilai ≤ 85 <i>75 < Score ≤ 85</i>	:	Baik <i>Good</i>
60 < Nilai ≤ 75 <i>60 < Score ≤ 75</i>	:	Cukup Baik <i>Fair</i>
50 < Nilai ≤ 60 <i>50 < Score ≤ 60</i>	:	Kurang Baik <i>Poor</i>
Nilai ≤ 50 <i>Score ≤ 50</i>	:	Tidak Baik <i>Bad</i>

Area of Improvement atas assessment yang telah dilakukan, dan tindak lanjutnya di tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Area of Improvement on the assessment which has been conducted, and its follow-up in 2017 can be seen in the table below.

No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 <i>Recommendation from the Assessment of GCG Implementation Year 2016</i>	Tindak Lanjut per 31 Desember 2017 <i>Follow-up as per 31 December 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Types of Follow-up</i>
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i>			
	- Nihil <i>- None</i>			
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Equity Owners</i>			
1	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan anggota Dewan Pengawas yang berasal dari kalangan di luar Perum Jamkrindo dan Pemerintah, sebagai Pengawas Independen. <i>Shareholders and GMS/Equity Owners have not set the members of the Board of Supervisors who come from outside Perum Jamkrindo and the Government, as an Independent Supervisor.</i>	v	2017	Kementerian BUMN selaku Pemilik modal telah mengangkat Dewan Pengawas Independen seperti tercantum dalam Keputusan Menteri BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. <i>Ministry of BUMN as the Equity Owner has appointed Independent Board of Supervisors, as stated in Decree of Minister of SOEs, as the Government Representative as Equity Owner of Perum Jamkrindo. This is in SK-88 / MBU / 05/2017 on the Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Supervisors of Perum Jamkrindo.</i>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 <i>Recommendation from the Assessment of GCG Implementation Year 2016</i>	Tindak Lanjut per 31 Desember 2017 <i>Follow-up as per 31 December 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Types of Follow-up</i>
III <i>Board of Commissioners/Board of Supervisors</i>				
1	<p>Jangka Waktu Persetujuan Dewan Pengawas atas rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) oleh Direksi. <i>Board Manual</i> Dewan Pengawas belum mengatur jangka waktu pemberian tanggapan terhadap rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan oleh Direksi.</p> <p><i>The Period of Approval of the Board of Supervisors on the draft of Work Plan and Corporate Budget (RKAP) proposed by the Board of Directors. Board Manual of the Board of Supervisors has not regulated the period of response to the Company's Long Term Plan (RJPP) draft and the Company's Work Plan and Budget (RKAP) proposed by the Directors.</i></p>	v	2017	<p>Dicarry over kedalam Laporan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2017</p> <p><i>Carried over in the 2017 GCG Self Assessment Report</i></p>
2	<p>Dewan Pengawas tidak menetapkan target kinerja dan penilaian kinerja untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas (individu), penilaian kinerja Dewan Pengawas masih dilakukan secara kolegial.</p> <p><i>Board of Supervisors does not set performance targets and performance assessment for each member of the Board of Supervisors (individual), performance assessment of the Board of Supervisors is still conducted collectively.</i></p>	v	2017	<p>Carry over kedalam Laporan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2017</p> <p><i>Carried over in the 2017 GCG Self Assessment Report</i></p>
IV <i>Directors</i>				
1	<p>Tingkat pencapaian kinerja Direksi (KPI) yang telah yang dilaporkan oleh Direksi kepada Pemilik Modal masih berbentuk kolegial, belum terdapat pencapaian kinerja direksi per individu.</p> <p><i>The performance achievement level of the Directors (KPI) that has been reported by the Directors to the Equity Owners is still in the form of collective, not yet performance of individual Director.</i></p>	v	2017	<p>Dicarry over kedalam Laporan <i>Self Assessment</i> GCG Tahun 2017</p> <p><i>Carried over in the 2017 GCG Self Assessment Report</i></p>



No.	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Ukur 2016 <i>Recommendation from the Assessment of GCG Implementation Year 2016</i>	Tindak Lanjut per 31 Desember 2017 <i>Follow-up as per 31 December 2017</i>		
		Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Types of Follow-up</i>
2	Perusahaan belum memiliki kebijakan mutu (sistem pengendalian mutu produk) <i>The company has not had quality policy (product quality control system).</i>	v	2017	Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No. 34/Per-Dir/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Mutu Perum Jamkrindo <i>Regulation of the Board of Directors of Public Corporation (Perum) of Indonesian Credit Guarantee (Jamkrindo) No. 34 / Per-Dir / XI / 2017 dated November 17, 2017, regarding Policy and Quality Management System Guidelines of Perum Jamkrindo</i>
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Disclosure of Information and Transparency.</i>				
1	Terdapat perbedaan informasi antara <i>Annual Report</i> Tahun 2015 dengan Laporan <i>Assessment</i> GCG Tahun 2015 mengenai susunan anggota Komite Audit. <i>There is a difference of information on the 2015 Annual Report and 2015 GCG Assessment Report on the composition of the Audit Committee members.</i>	v	2017	Laporan tahunan Perusahaan telah memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan Perusahaan mendapatkan juara ke-2 untuk kategori BUMN Keuangan Non Listed dalam ARA 2016 <i>The Company's annual report meets the general requirements of presentation of the Annual Report. This is confirmed by the Company obtaining 2nd place for the category of Non-Listed Finance SOEs in ARA 2016</i>
2	Perusahaan belum memiliki kebijakan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran <i>website</i> <i>The company has not had a policy on managing and updating the website.</i>	v	2017	Keputusan Direksi No. 101/Kep-Dir/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Penetapan Situs Web dan Susunan Pengurus Situs Web Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia <i>Board of Directors' Decree No. 101 / Kep-Dir / X / 2017 dated October 9, 2017, on the Establishment of Web Site and Composition of Public Website of Public Corporation (Perum) Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo)</i>
VI Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i> - Nihil - None				

Assessment Tahun 2017

Penilaian juga dilakukan pada tahun buku 2017 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 1373/SPT/1/IX/2017 tanggal 26 September 2017.

Assessment of Fiscal Year 2017

Assessment was also conducted in the fiscal year 2017 with the aim of providing recommendations on continuous improvement of the Company's GCG implementation. The assessment process was conducted based on the SPT No. 1373/SPT/1/IX/2017 dated September 26, 2017.



Jenis Penilaian <i>Types of Assessment</i>	:	Self Assessment/Evaluasi <i>Self Assessment/Evaluation</i>
Assessor	:	Tim Self Assessment Internal Perum Jamkrindo <i>Internal Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>
Metode Penilaian <i>Assessment Method</i>	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S. MBU/2012 <i>Assessment Indicator/Parameter of GCG Implementation SK16/S.MBU/2012</i>
Tahun Buku Penerapan <i>Implementation Year</i>	:	1 Januari - 31 Desember 2017 <i>1 January - 31 December 2017</i>
Periode Pengukuran <i>Assessment Period</i>	:	26 September 2017 - 28 Februari 2018 <i>26 September 2017 - 28 February 2018</i>

Hasil penilaian penerapan GCG Perum Jamkrindo tahun 2017 mencapai total skor sebesar 92,470 dengan kualifikasi SANGAT BAIK, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The assessment result of Perum Jamkrindo GCG assessment in 2017 achieved a total score of 92.470 with "VERY GOOD" qualification, which can be seen in the following table.

Aspek <i>Aspect</i>		Bobot <i>Weight</i>	Nilai <i>Amount</i>	Pencapaian (%) <i>Achievement (%)</i>
1	2	3	(4=3/2 x 100)	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation</i>	7.000	6.924	98.912
II	Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal <i>Shareholders and RPB/Equity Owners</i>	9.000	8.568	95.194
III	Dewan Pengawas <i>Board of Supervisors</i>	35.000	32.085	91.671
IV	Direksi <i>Directors</i>	35.000	32.426	92.647
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9.000	8.468	94.085
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5.000	4.000	80.000
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>		100.000	92.470	92.470
Peringkat Kualitas Penerapan GCG <i>Rank of the GCG Implementation Quality</i>		"Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>		

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment

Classification of Assessment Implementation Quality

Nilai di atas 85 <i>Score above 85</i>	:	Sangat Baik <i>Very Good</i>
75 < Nilai ≤ 85 <i>75 < Score ≤ 85</i>	:	Baik <i>Good</i>
60 < Nilai ≤ 75 <i>60 < Score ≤ 75</i>	:	Cukup Baik <i>Fair</i>
50 < Nilai ≤ 60 <i>50 < Score ≤ 60</i>	:	Kurang Baik <i>Poor</i>
Nilai ≤ 50 <i>Score ≤ 50</i>	:	Tidak Baik <i>Bad</i>



Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Perum Jamkrindo dinilai telah memiliki sistem dan infrastruktur yang sangat baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki guna mendukung penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Beberapa parameter yang perlu diperbaiki diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan
Perum Jamkrindo segera melakukan revisi Pedoman Whistleblowing System (WBS) berupa mekanisme pelaporan pelanggaran, penyempurnaan sarana dan prasarana pelaporan dan penunjukan pengelola WBS.
2. Pemegang Saham dan RPB/Pemilik Modal
Nihil
3. Dewan Pengawas
 - a. Dewan Pengawas sebaiknya melaksanakan program pelatihan/seminar/workshop sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas dan membuat laporan atas kegiatan tersebut.
 - b. Melakukan revisi Board Manual dengan menetapkan jangka waktu pemberian tanggapan dari Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi.
 - c. Menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (self assessment) terhadap kinerja masing-masing Dewan Pengawas serta melaporkannya kepada Pemilik Modal.
 - d. Dewan Pengawas agar memberikan arahan dalam Rapat Internal dan Rapat Gabungan dengan Direksi mengenai kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya untuk meningkatkan kinerja operasional Perusahaan.
4. Direksi
 - a. Menyusun target kinerja individual dan melakukan penilaian secara mandiri (self assessment) terhadap kinerja masing-masing Direksi serta melaporkannya kepada Dewan Pengawas.
 - b. Segera melakukan finalisasi atas SOP Teknologi Informasi dan Kebijakan Tata Kelola & Manajemen Teknologi Informasi.
 - c. Melakukan sertifikasi standar mutu pelayanan untuk kegiatan bisnis utama dengan menunjuk lembaga yang kompeten dan melakukan audit atas pelaksanaan sistem mutu.
 - d. Segera melakukan finalisasi atas Kebijakan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Nihil
6. Aspek Lainnya
Nihil

Based on the assessment result, Perum Jamkrindo is considered to have a very good system and infrastructure, but there are some areas that still need to be improved in order to support the implementation of Good Corporate Governance principles. Some parameters that need to be improved are described as follows:

1. The Aspect of Commitment on Sustainable Good Corporate Governance Implementation.
Perum Jamkrindo needs to immediately revise the Whistleblowing System Guideline (WBS) in the form of violation reporting mechanism, improvement of facilities and infrastructure of reporting and appointment of WBS manager.
2. Shareholders and RPB/Equity Owners
None
3. Board of Supervisors
 - a. The Board of Supervisors should implement a training/seminar/workshop program in accordance with the Board's annual work plan and budget, and prepare reports on such activities
 - b. Revise the Board Manual by stipulating the period of response of the Board of Supervisors regarding the draft of RKAP proposed by the Board of Directors.
 - c. Set individual performance targets and conduct self-assessment on the performance of each member of the Board of Supervisors and report it to the Equity Owners.
 - d. Board of Supervisors needs to provide guidance in the Internal Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors on quality policy and services and their implementation to improve the Company's operational performance.
4. Directors/Board of Directors
 - a. Establish individual performance targets and conduct self-assessment of the performance of each member of the Board of Directors and report them to the Board of Supervisors.
 - b. Conduct immediate finalization of SOP of Information Technology, as well as the Information Technology Governance & Management Policy.
 - c. Certify quality standard of service for main business activity by appointing competent institution and conducting audit on quality system implementation.
 - d. Conduct immediate finalization of Health and Work Safety Policy.
5. Information Disclosure and Transparency
None
6. Other Aspects
None



Perjalanan Assessment Perum Jamkrindo

The History of Assessment of Perum Jamkrindo

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

Overview of the history of assessment process of the Company's GCG implementation is as follows:

Pengukuran GCG	Tahun Buku <i>Fiscal Year</i>	Assessor	Skor <i>(%)</i>	Kategori
<i>Self Assessment</i>	2013	Tim Self Assesment Perum Jamkrindo <i>Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>	90,080	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Assessment</i>	2014	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali <i>Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali</i>	91,510	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Self Assessment</i>	2015	Tim Self Assesment Perum Jamkrindo <i>Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>	91,563	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Assessment</i>	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali <i>Public Accountant Office Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali</i>	92,120	Sangat Baik <i>Very good</i>
<i>Self Assessment</i>	2017	Tim Self Assesment Perum Jamkrindo <i>Self Assessment Team of Perum Jamkrindo</i>	92,470	Sangat Baik <i>Very good</i>





Hasil *assessment* atas penerapan GCG Perum Jamkrindo periode tahun 2012-2016 dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

The assessment result of GCG implementation at Perum Jamkrindo for the period of 2012-2016 can be summarized below:

No	Aspek Pengujian/ Indikator/ Parameter <i>Aspect of Testing/ Indicator/ Parameter</i>	Bobot Weight	Capaian Tahun 2013 <i>Achievement 2013</i>		Capaian Tahun 2014 <i>Achievement 2014</i>		
			Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan <i>Commitment on Sustainable Governance Implementation</i>	7,00	6,36	90,86	6,96	99,35	
2	Pemegang Saham dan Rups/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Equity Owners</i>	9,00	8,46	94,04	8,12	90,19	
3	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/ Board of Supervisors</i>	35,00	31,31	89,45	31,59	90,26	
4	Direksi <i>Directors</i>	35,00	32,31	92,32	32,93	94,09	
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,00	7,89	87,66	7,91	87,9	
6	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,00	3,75	75,00	4,00	80,00	
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>		100,00	90,08	90,08	91,51	91,51	
Klasifikasi <i>Classification</i>			"Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>		Sangat Baik" <i>"Very Good"</i>		

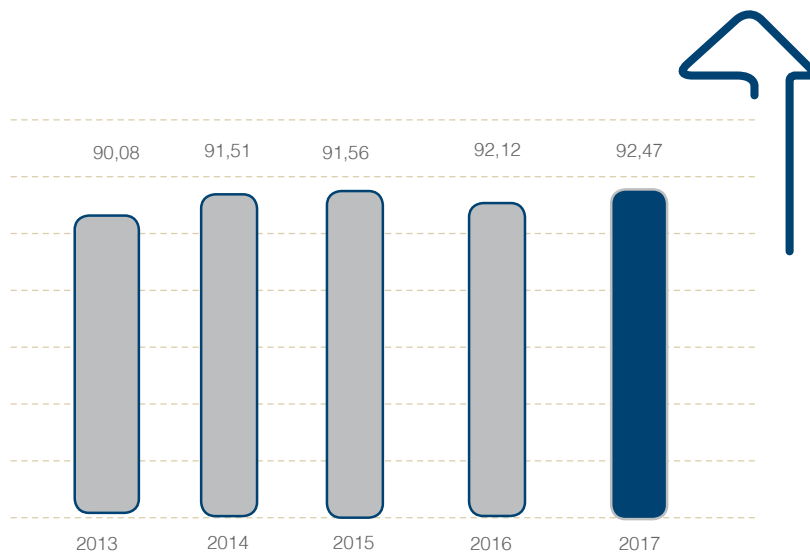


	Capaian Tahun 2015 <i>Achievement 2015</i>		Capaian Tahun 2016 <i>Achievement 2016</i>		Capaian Tahun 2017 <i>Achievement 2017</i>	
	Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement	Skor Score	% Capaian Achievement
	6,95	99,35	6,96	99,46	6,92	98,91
	8,11	90,07	8,21	91,18	8,57	95,19
	31,61	90,32	32,25	92,14	32,08	91,67
	32,94	94,12	32,94	94,12	32,43	92,65
	7,95	88,32	7,76	86,23	8,47	94,08
	4,00	80,00	4,00	80,00	4,00	80,00
	91,56	91,56	92,12	92,12	92,47	92,47
	Sangat Baik "Very Good"		"Sangat Baik" "Very Good"		Sangat Baik "Very Good"	



Komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip GCG dan melakukan evaluasi terhadap penerapan tersebut ditunjukkan melalui tren peningkatan skor *assessment* GCG. Melalui *assessment*, Perusahaan mendapatkan rekomendasi secara berkala, yang memungkinkan bagi Perusahaan untuk terus melakukan pembenahan baik dari infrastruktur atau perangkat GCG, hingga *softstructure* GCG yang dimiliki. Tren skor *assessment* GCG 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The Company's commitment to apply GCG principles and assess the implementation is demonstrated through the trend of increasing the GCG assessment score. Through the assessment, the Company receives periodic recommendations, enabling the Company to continue improvements from either GCG infrastructure or equipment, to GCG's own soft structure. The latest 5 (five) years GCG assessment score trends are as follows:





STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

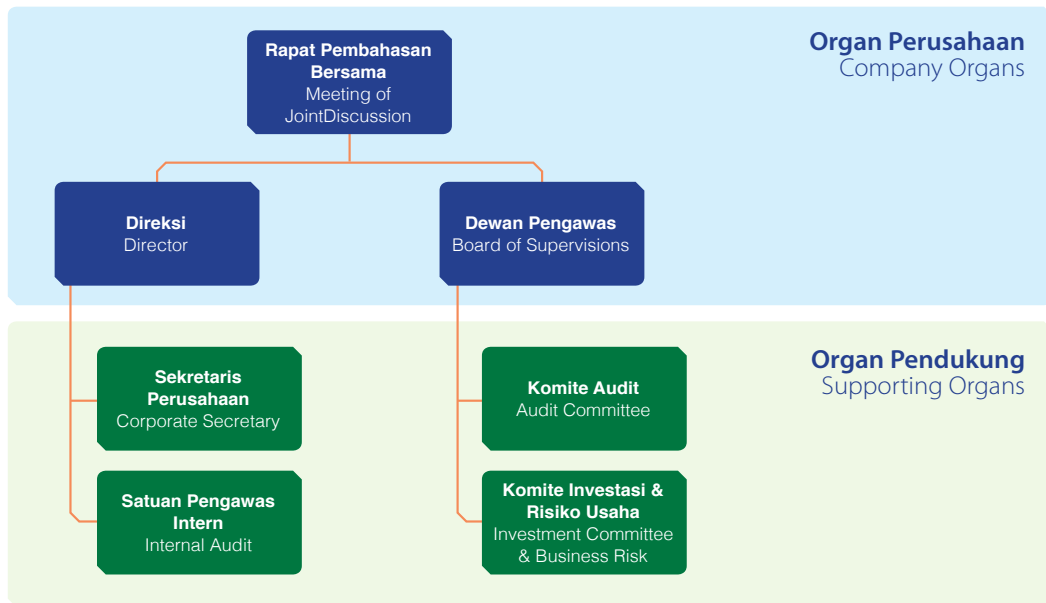
Organ Structure of Corporate Governance

MEKANISME HUBUNGAN ANTAR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

RELATIONSHIP MECHANISM AMONG THE CORPORATE GOVERNANCE ORGANS

Struktur Organ GCG Perum Jamkrindo

Organ Structure of GCG Perum Jamkrindo



Dalam forum Rapat Pembahasan Bersama (RPB), para Pemilik Modal dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RPB didasarkan pada kepentingan Perusahaan. RPB atau Pemilik Modal tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RPB untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, para Pemilik Modal akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RPB kemudian akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Pengawas dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RPB tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan

In the Joint Discussion Meeting (RPB) forum, the Equity Owner can make important decisions related to the investments invested in the Company. The decisions made in RPB are based on the Company's interests. RPB or Equity Owner can not intervene the duties, functions, and authorities of the Board of Supervisors and Directors yet not reducing RPB authority to exercise its rights in accordance with the Articles of Association and Laws and Regulations. With equal standing, the Equity Owner shall carefully consider its decisions for the sake of the Company's longterm interests. After a decision is taken, RPB shall then submit all authorities of the supervision and execution to implement the decision to the Board of Supervisors and Directors. This is in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

The Company's management and implementation of any RPB decisions will be conducted by the Directors. The Board of Supervisors then exercises supervision and advises to ensure that the Company's objectives and RPB decisions



Perusahaan serta keputusan RPB tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut

are optimally implemented and achieved to the fullest or maximum. With such huge duties and responsibilities in maintaining the continuity of the Company, the Board of Supervisors is assisted by Supporting Committees while the Directors are assisted by work units associated with the governance mechanism.



PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

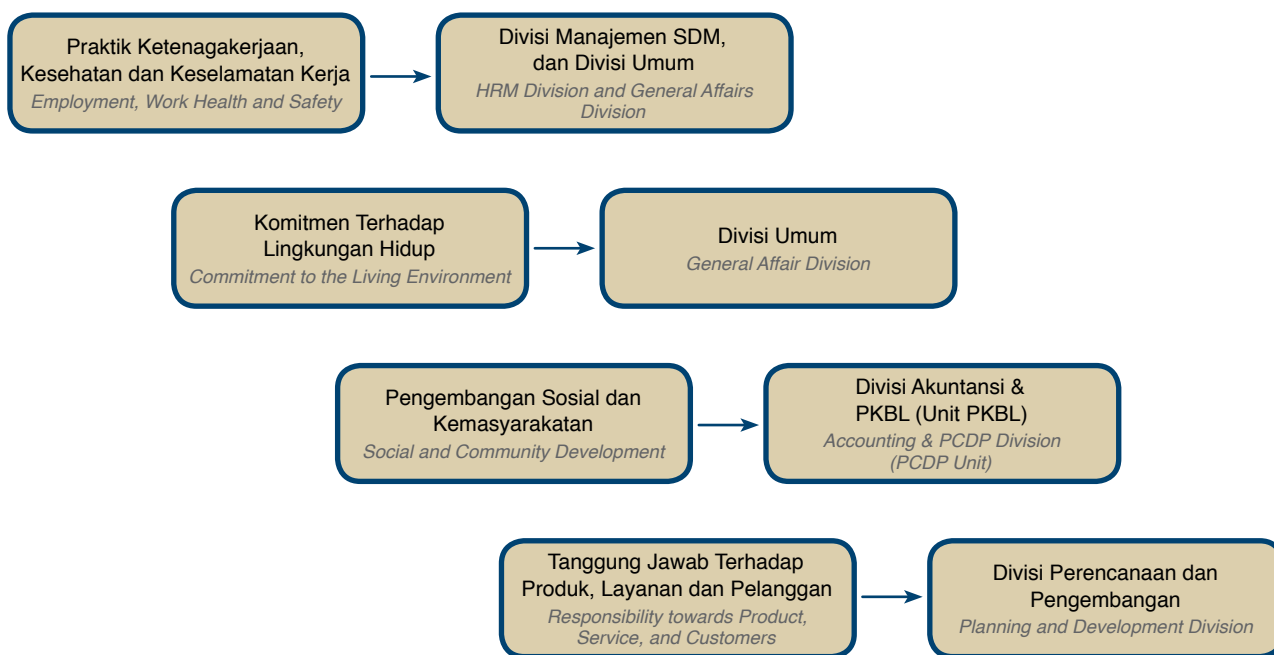
Manager of Corporate Social Responsibility Programs

PENGELOLA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di lingkup Perum Jamkrindo, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Unit/Divisi dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program, seperti yang tergambar di bawah ini.

MANAGER OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS

To fulfill the Corporate Social Responsibility programs thoroughly in Perum Jamkrindo, the implementation of the overall program is divided into several Units/Divisions with their own responsibilities based on the program category, as illustrated below:



PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Partnership and Community Development Program

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan diwujudkan Perum Jamkrindo melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program mulia ini sejatinya menempatkan BUMN sebagai Agen Pembangunan yang memiliki aspek pengelolaan usaha berbasis laba, sekaligus mendorong perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik.

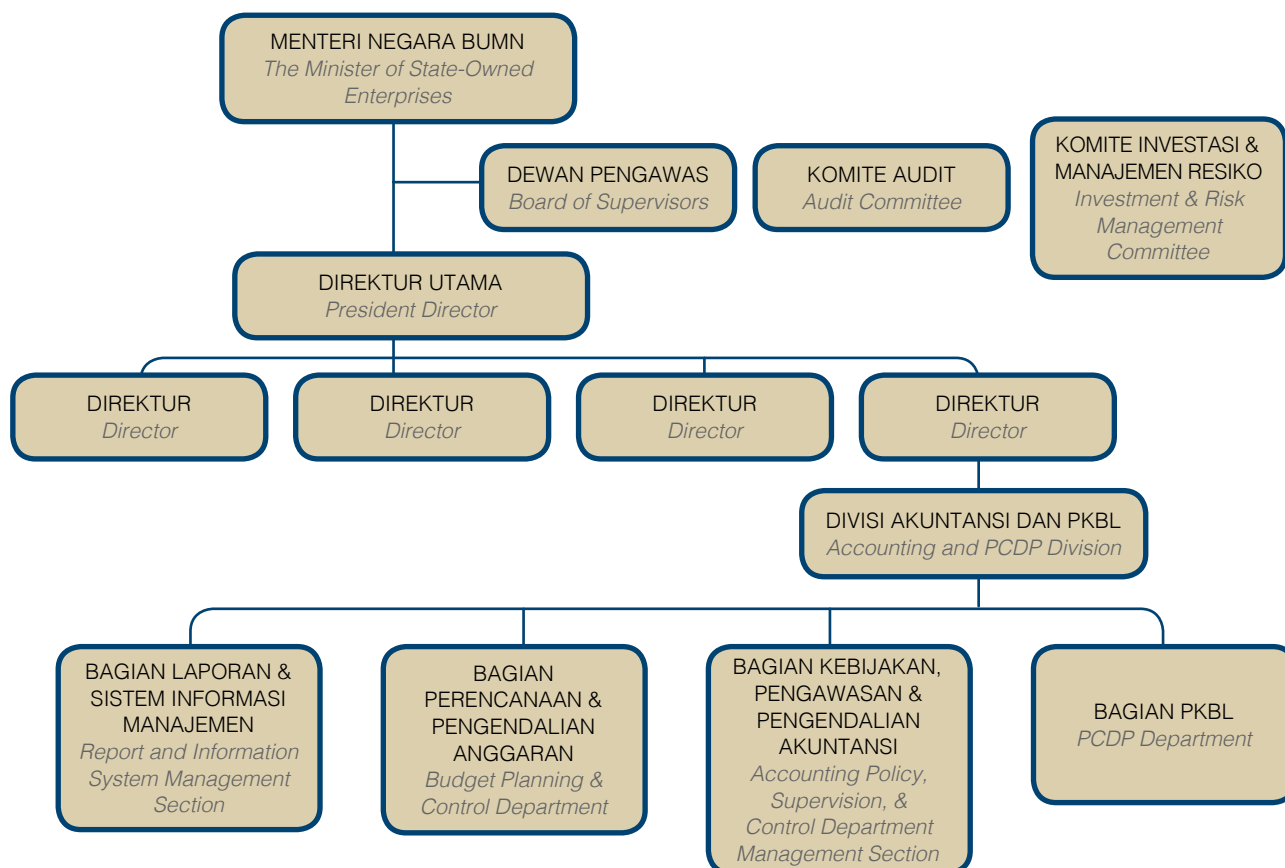
Sebagai BUMN, Perum Jamkrindo mendapatkan penugasan untuk melaksanakan PKBL di wilayah kerjanya. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo. Salah satu bentuk bantuan dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

The implementation of Corporate Social Responsibility related to social and community development is realized by Perum Jamkrindo through the implementation of the Partnership and Community Development Program (PCDP). This noble program actually puts SOEs as Development Agents which have the aspect of profit-based business management, as well as encouraging social change to a better society.

As a SOE, Perum Jamkrindo has been assigned to implement PCDP in its working area. The Partnership Program is a program to increase the capability of small businesses in the form of loans, in order to be resilient and independent. On the other hand, the Community Development Program is a program of community social empowerment in the form of providing assistance to the community around the working area of Perum Jamkrindo. One of the forms of assistance in the Community Development Program is the funding assistance to the assisted partners (small businesses and cooperatives) to encourage and develop their business activities in order to become strong and independent so as to improve the living standard of the community.

PENGELOLA PKBL PERUM JAMKRINDO

Struktur Organisasi PKBL Perum Jamkrindo



MANAGER OF PCDP OF PERUM JAMKRINDO

The Organizational Structure of PCDP of Perum Jamkrindo



Berikut adalah Sumber Daya Manusia yang menangani program PKBL Perum Jamkrindo.

The Person in Charge of the PCDP Program of Perum Jamkrindo is elaborated as follows:

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment, and Risk Management</i>	:	I. Rusdonobanu
Kepala Divisi Akuntansi dan PKBL <i>Head of Accounting and PCDP Division</i>	:	Diana Mayawati
Kepala Bagian PKBL <i>Head of PCDP Subdivision</i>	:	Lies Nun Heriyatishah
Kepala Seksi PK <i>Head of PP Section</i>	:	Irma Hartati
Kepala Seksi BL <i>Head of CD Section</i>	:	Eka Marta Fitria
Staf PKBL <i>PCDP Staff</i>	:	Retno Indriani Muhamad Azikri Gumilar

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN PKBL TAHUN 2017

TARGET AND PLANNING OF PCDP ACTIVITIES IN 2017

Di setiap awal tahun, Perum Jamkrindo telah melakukan perumusan rencana kerja dan anggaran terkait pelaksanaan PKBL. Berikut disampaikan target dan rencana kegiatan PKBL yang telah dicanangkan di awal tahun 2017.

In the beginning of every year, Perum Jamkrindo plans its working plan and budget related to PCDP. The target and planning of PCDP activities formulated in the beginning of 2017 is elaborated as follows:

Program Kemitraan *Partnership Program*

Sasaran

- Tersalurnya dana Program Kemitraan di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo sebesar Rp7.874.000.000.
- Adanya penyebaran penyaluran dana Program Kemitraan ke seluruh Kanca Perum Jamkrindo.

Goals

- *Distribution of Partnership Program funds in all work units of Perum Jamkrindo is IDR7,874 million.*
- *Distribution of Partnership Program funds to all Branch Offices of Perum Jamkrindo.*

Strategi

- Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
 - » Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.
 - » Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
 - » Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinyu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
- Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh Perum Jamkrindo.
- Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di sektor pertanian.



Strategies

- *Intensification of Partnership Program by optimizing the implementation of Partnership Program so that the partners will become more resilient and self-reliant, such as:*
 - » Improving management capabilities and production of assisted partners by engaging in management and financial training and providing management consulting assistance in accordance with the company's HR capabilities.
 - » Improving marketing access of partners' products by engaging in promotional/exhibitional activities and marketing efforts of coached partners through the role of national companies.
 - » Improving sustainable development by conducting continuous on-site visits to partners' business location to evaluate and monitor business developments and problems, and to assist in providing improvement advice/solutions, and to intensify collection to partners by considering the conditions of the assisted partners.
- *Extensification of Partnership Program, by searching potential, qualified partners candidates which have profitable business prospects, through Government or private trade or industry organization, or directly conducted by Perum Jamkrindo.*
- *Synergize with other SOEs or other parties in the implementation of Partnership Program fund's distribution, among others, with PT Permodalan Nasional Madani (PNM) in the agricultural sector.*

Program Bina Lingkungan*Community Development Program***Sasaran**

Tersalurinya dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp8.976.855.932 di seluruh unit kerja Perum Jamkrindo dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Perum Jamkrindo.

Goal

The increment of Community Development Program fund amounting to IDR8,976,855,932 in all work units of Perum Jamkrindo in the form of provision of assistance to the community around the working area of Perum Jamkrindo.

Strategi

Melaksanakan penyaluran dana Bina Lingkungan melalui kerjasama dengan Yayasan, LSM, maupun warga masyarakat.

Strategy

Distribution of the Community Development fund through cooperation with Foundations, NGOs, and community members.



Daftar Alamat Entitas Anak dan Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

List of Address of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices



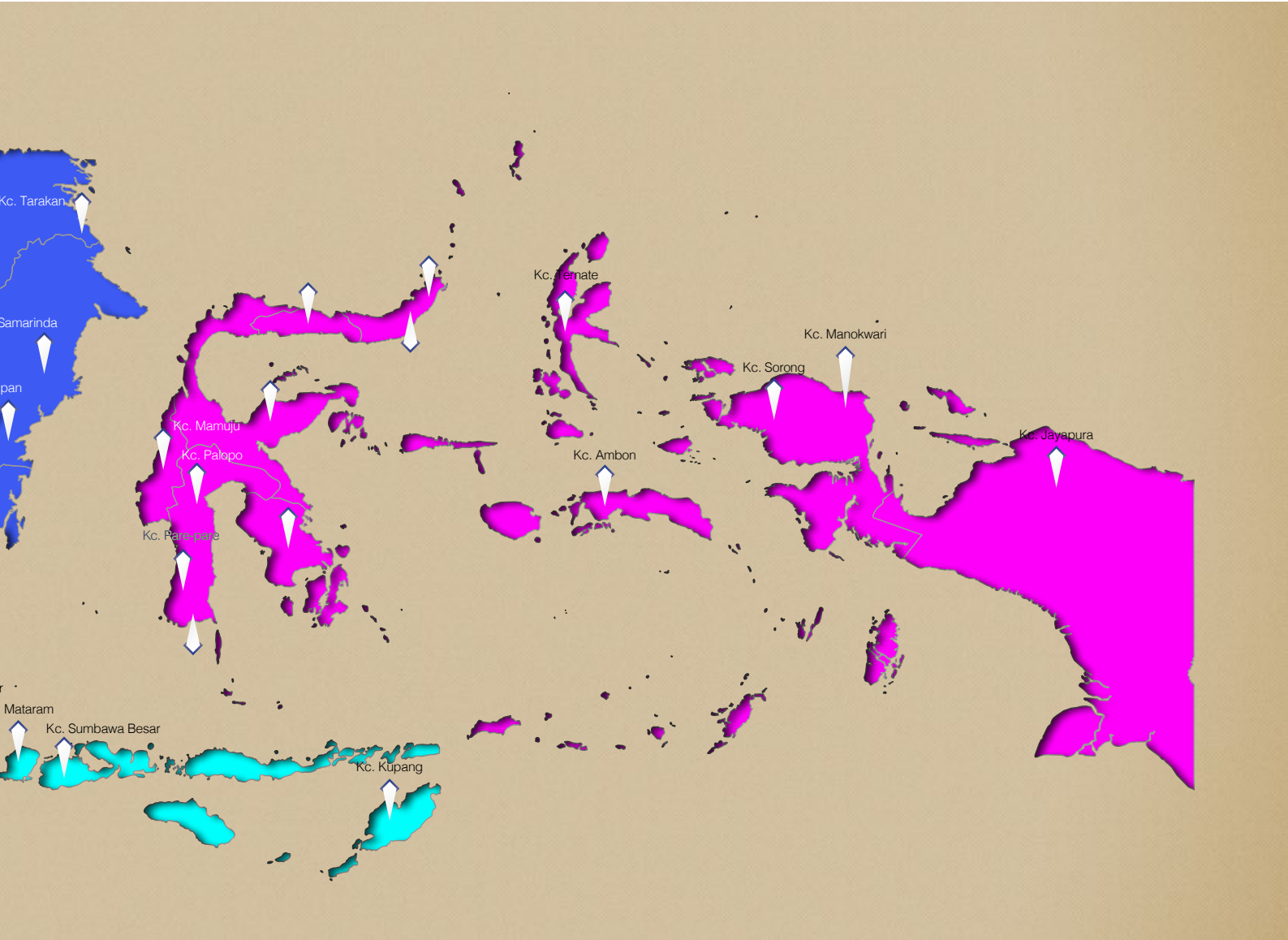
Kantor Wilayah

Regional Office

Kantor Pusat Perum Jamkrindo
Head Office of Perum
Jamkrindo

:

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp: +62 21 6540335
Fax: +62 21 6540344, 6540348
Website: www.jamkrindo.co.id
Email: sekper@jamkrindo.co.id



Entitas Anak
Subsidiaries

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah :

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Lantai 7
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp: +62 21 6540386
Fax: +62 21 6540389
Website: www.jamkrindosyariah.co.id
Email: info@jamkrindosyariah.co.id

Kantor Cabang

Regional Office

Kantor Wilayah (Kanwil)

Regional Office

Kanwil Regional Office	Alamat Address
I Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan - 20111
II Palembang	Jl. Residen abdul rozak No.188-189 kelurahan kalidoni Palembang
III DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta
IV Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: 022-7801890
V Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A, Semarang, Jawa Tengah
VI Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3, Surabaya, Jawa Timur; Telp: 031-8685567
VII Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76, Denpasar, Bali; Telp: 0361-286854
VIII Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210-B, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
IX Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112, Sulawesi Selatan; Telp: 0411-875836

Kantor Cabang Khusus

Jakarta Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: 021-65868278

Kantor Cabang

Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40, Medan, Sumatera Utara Telp: (061)4152827, 4155767, Fax: (061) 4156775
	2 Pekanbaru	JL. Jend. Sudirman No 150, Kel. Suka Ramai, Pekanbaru 28113, Riau; Telp: 0761-854311, 854870; Fax: 0761-848801
	3 Aceh	Jl. Syah Kuala No.10 A-B, Kel. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh 23126, DI Aceh
	4 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C, Padang, Sumatera Barat; Telp: 0751-7050598
	5 Tanjung Pinang	Komp. Ruko Pamedan, Jl. Raja Ali Haji No. 6, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Telp: 0771-316919
	6 Batam	Jl.Raja Ali Haji Fisabilillah, Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau; Telp: 0778-7495993
	7 Balige	Jl. Siliwangi No. 08 Balige, Tobasa, Sumatera Utara; Telp: 0632-21722



Kantor Cabang Branch Office		
Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
II	8 Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak No. 188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang
	9 Jambi	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi
	10 Bengkulu	Jl. Ahmad Yani Rt. 004/Rw 001 No. 28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119
	11 Bandar Lampung	Jl. Teuku Umar No. 10 E-F, Kedaton, Bandar Lampung 35141, Lampung; Telp: 0721-778511
	12 Pangkal Pinang	Jl. A Yani No. 11 H Pangkal Pinang - 33136
III	13 DKI Jakarta	Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: 021-6540409
	14 Pontianak	Jl. Teuku Umar, Komp. Perkantoran Pontianak Mall Blok B/24, Pontianak, Kalimantan Barat; Telp: 0561-749095
	15 Serang	Jl. Jendral A. Yani No. A1, Serang 42117, Banten; Telp: 0254-228999
	16 Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1, Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Banten
IV	17 Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722, Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Telp: 022-7801890
	18 Cirebon	Jl. Sudarsono No. 10 B, Kota Cirebon, Jawa Barat
	19 Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No. 55 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa barat
	20 Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No. 90 Rt. 05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113
	21 Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F, Kel. Lengkongsari Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat; Telp: 0265-314169
V	22 Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A, Semarang, Jawa Tengah
	23 Yogyakarta	Jl. Parangtritis Km. 1 No. 96, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergansan, Yogyakarta; Telp: 0274-375989
	24 Solo	Jl. Agus Salim No. 27 A, Surakarta, Jawa Tengah; Telp: 0271-719807
	25 Purwokerto	Jl. Prof Suharso No. 1186 A, Purwokerto, Jawa Tengah; Telp: 0281-6572555
	26 Kudus	Jl. A. Yani Komplek KAI A-4, Kudus, Jawa Tengah; Telp: 0291-430757
VI	27 Pekalongan	Ruko The Luxor Jl. Ahmad Yani No. 02 Wiradesa, Pekalongan
	28 Surabaya	Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2-3, Surabaya, Jawa Timur
	29 Kediri	Jl. Letjend. S. Parman No. 47, Kediri, Jawa Timur; Telp: 0354-7418826
	30 Banyuwangi	Jl. Adisucipto No. 104 B, Banyuwangi, Jawa Timur; Telp: 0333-418140
	31 Malang	Jl. Kaliurang No. 37 C, Kel. Rampalclaket, Kec. Klojen, Malang, Jawa Timur; Telp: 0341-363962
VII	32 Madiun	Jl. S. Parman Ruko Suncity Festival B-8, Madiun, Jawa Timur; Telp: 0351-4472250
	33 Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76, Denpasar, Bali; Telp: 0361-286854
	34 Mataram	Ruko Airlangga Square No. 3 Jl. Airlangga Mataram 83125
	35 Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82, Kec. Sumbawa Besar, NTB; Telp: 0371-2629239
	36 Kupang	Jl. Bundaran PU, Ruko TDM II No. 4, Oebufu, Kupang, NTT; Telp: 0380-8553899



Kantor Cabang
Branch Office

Kanwil Regional Office	Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address
VIII	37 Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117
	38 Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 17 D Kuripan Banjarmasin-70236
	39 Palangkaraya	Jl. Christopel Mihing No. 31, Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Telp: 0536-3226895
	40 Tarakan	Jl. Cendrawasih RT. 004, Karanganyar Pantai, Tarakan, Kalimantan Utara; Telp: 0551-30448
	41 Balikpapan	Jl. Mayjen Sutoyo No. 26 C, Balikpapan, Kalimantan Timur; Telp: 0542-791908
	42 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140, Makassar, Sulawesi Selatan; Telp: 0411-873031
	43 Gorontalo	Jl. HB Hasin (KH Agus Salim) No. 222, Gorontalo; Telp: 0435-828003
	44 Mamuju	Jl. Marthadinata No.11, Mamuju, Sulawesi Selatan; Telp: 0426-2324878
	45 Ambon	Jl. Phillit Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126
	46 Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo-Ubo, Kel. Tabona, Ternate, Maluku Utara; Telp: 0921-3122739
IX	47 Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura, Ruko Pasifik Permai Blok H No. 17, Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara, Jayapura, Papua; Telp: 0967-524424
	48 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari, Papua Barat; Telp: 0986-214184
	49 Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C, Palu 94121, Sulawesi Tengah; Telp: 0451-4131812
	50 Kendari	Jl. La Ode Hadi No 56 B, Kendari 93118, Sulawesi Tenggara; Telp: 0401-3196780
	51 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43, Manado, Sulawesi Utara; Telp: 0431-865194, 865198
	52 Bitung	Jl. Sam Ratulangi No. 1, Bitung, Sulawesi Utara; Telp: 0438-35939
	53 Pare-pare	Jl. Andi Mappatola No. 30-C, Parepare, Sulawesi Selatan; Telp: 0421-2914592
	54 Palopo	Jl. Batara Lattu No. 74, Palopo 91913, Sulawesi Selatan; Telp: 0471-23006
	55 Sorong	Jl. Basuki Rahmat Km. 9, Sorong, Papua Barat; Telp: 0951-329081



Kantor Unit Pelayanan (KUP)
Services Unit Office (KUP)

Kanwil Regional Office	Kantor Unit Pelayanan Services Unit Office	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 391, Kota Dumai, Riau; Telp: 0765-439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No. 04 Rantau Prapat, Sumatera Utara
	3 Mandailing Natal	Willem Iskandar No. 81 Panyabungan - 22913
II	4 Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso RT 001 No. 366, Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan; Telp: 0733-3281182
III	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor, Jawa Barat; Telp: 0251-7564211
	6 Cibinong	Ruko Clbinong City Center, Jl. Tegar Beriman 1 Blok A No. 29, Cibinong, Bogor, Jawa Barat; Telp: 021-29335250
	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A Nomor 7Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi
IV	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C, RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah
	10 Cilacap	Jl Raya Sudirman, Cilacap, Jawa Barat
VI	11 Surabaya Kota	Jl. Kusuma Bangsa No. 86 B, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur
	12 Pamekasan	Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Pamekasan, Jawa Timur; Telp: 0324-3510118
	13 Jember	Jl. Gajah Mada No. 187 Jember, Jawa Timur; Telp: 0331-4431044
	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.11 A kabupaten Bojonegoro
VIII	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar, Arut Selatan, Kotawaringin Barat 74113, Kalimantan Tengah
IX	16 Watampone	Jl. Ahmad Yani No. 29 B, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Watampone, Sulawesi Selatan; Telp: 0481-2921479

2017

Rangkuman Laporan Tahunan
Summary Annual Report



Kantor Pusat / Head Office

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar Kemayoran
Phone : (021) 6540335
Email : sekper@jamkrindo.co.id



www.jamkrindo.co.id